



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 65 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 48 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2021 – 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026 beberapa Perangkat Daerah harus disesuaikan;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Kota Blitar Tahun 2023, Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026 Perangkat Daerah harus mengintegrasikan pohon kinerja dalam Dokumen Perencanaan, sehingga Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
 10. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
 11. Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 48) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 48 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2021 – 2026.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 48) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 32) diubah, sehingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 12 Desember 2023
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2023 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 65 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
WALIKOTA NOMOR 48 TAHUN 2021 TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH KOTA BLITAR TAHUN
2021-2026

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 48 TAHUN 2021
TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KOTA BLITAR TAHUN 2021-2026

1. PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2021-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sekretariat Daerah Kota Blitar adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur staf mempunyai tugas membantu Wali Kota Blitar dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Oleh karenanya Sekretariat Daerah Kota Blitar memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan Visi dan Misi Wali Kota Blitar.

Dalam rangka melaksanakan tugas diatas perlu kiranya disusun dokumen perencanaan yang dapat memberikan gambaran dukungan Sekretariat Daerah Kota Blitar dalam mewujudkan Visi dan Misi Wali Kota Blitar. Rencana Strategis yang disusun merupakan rumusan strategi dan arah kebijakan Sekretariat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja dari Perangkat Daerah yang dalam hal ini adalah Sekretariat Daerah Kota Blitar.

Berkenaan dengan proses penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Blitar adalah sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah.
Tahapan ini dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Melaksanakan pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah dan dituangkan dalam Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Blitar Nomor 188/12/410.020.6/2021 Tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026.
 - 2) Melaksanakan Orientasi berkenaan dengan Rencana Strategis guna menyamakan persepsi serta memberikan pemahaman dalam penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Blitar.
 - 3) Tim Penyusun sebagaimana telah ditetapkan sesuai angka 1, menyusun agenda kerja Tim Penyusun Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Blitar.
 - 4) Masing masing kelompok kerja menghimpun dan menyiapkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Blitar.
- b. Penyusunan rancangan awal Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Blitar
Penyusunan rancangan awal Rencana Strategis Sekretariat Daerah dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD Kota Blitar yang mencakup analisis gambaran pelayanan Sekretariat Daerah, analisis permasalahan, penelaahan dokumen Rencana Strategis Provinsi Jawa Timur, analisis isu strategis, perumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kinerja. Penyusunan berdasarkan Surat Edaran Wali Kota Blitar Nomor 050/288/410.202.2/2021 Perihal Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
- c. Penyusunan rancangan Rencana Strategis Sekretariat Daerah;
Rancangan Rencana Strategis Sekretariat Daerah merupakan penyempurnaan rancangan awal RENSTRA SETDA yang disusun berdasarkan Surat Edaran Wali Kota Blitar Nomor 050/2082/410.202.2/2021 Perihal Penyusunan Rancangan Renstra/Penyempurnaan Ranwal Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dilaksanakan dengan dihadiri oleh Pejabat dilingkungan Sekretariat Daerah Kota Blitar, Perwakilan Bappeda Kota Blitar dan Perangkat Daerah terkait. Pada forum ini dilaksanakan pembahasan tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta indikator kinerjanya. Setelah pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah dilaksanakan penandatanganan Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.
- e. Perumusan rancangan akhir
Tahapan ini merupakan penyempurnaan rancangan Renstra Sekretariat Daerah menjadi Rancangan Akhir Renstra Sekretariat Daerah dengan berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Rancangan Akhir Renstra Sekretariat Daerah disusun guna mempertajam strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- f. Penetapan.
Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah disampaikan kepada Bappeda untuk diverifikasi. Renstra yang telah diverifikasi tersebut

kemudian disampaikan kepada Wali Kota Blitar melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan Dengan Peraturan Wali Kota Blitar.

- g. Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026

Dalam pelaksanaannya Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026, perlu dilakukan beberapa penyesuaian. Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kota Blitar ini dilakukan karena beberapa hal:

1. Terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang berdampak pada pemutakhiran seluruh kode sub kegiatan dan penambahan sub kegiatan.
2. Tindak lanjut evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Kota Blitar Tahun 2023 terkait integrasi pohon kinerja ke dokumen perencanaan. Penyesuaian dilakukan pada level tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sesuai hasil pemetaan Pohon Kinerja Perangkat Daerah

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026 berdasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 30. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional;
 31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15-5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 32. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.14.3/1483/SJ tertanggal 10 Maret 2023 tentang Hasil Pemetaan, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan

- Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Penggunaan DBH CHT TA 2023, DBH DR TA 2023, dan DAK TA 2023;
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
 34. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 2);
 35. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2012 Nomor 1)
 36. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
 37. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 38. Peraturan Walikota Blitar Nomor 83 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2020 Nomor 83);
 39. Peraturan Walikota Blitar Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah dimaksudkan untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang urusan penunjang Sekretariat Daerah untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Sedangkan Tujuan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut:

- Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah di Urusan Penunjang Sekretariat Daerah.
- Menjadi acuan kerja resmi bagi dinas serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan Urusan Penunjang Sekretariat Daerah.
- Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja (nama OPD)

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026 sesuai dengan yang tertuang didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan

	1.4	Sistematika Penulisan
BAB II		GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH
	2.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Blitar
	2.2	Sumber Daya Sekretariat Daerah Kota Blitar
	2.3	Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Blitar
	2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
BAB III		PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
	3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Blitar
	3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih
		Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra
	3.3	SKPD Provinsi Terkait
		Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
	3.4	Lingkungan Hidup Strategis
	3.5	Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV		TUJUAN DAN SASARAN
	4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah Kota Blitar
BAB V		STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI		RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA RENCANA PENDANAAN
BAB VII		KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII		PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Blitar

Sekretariat Daerah Kota Blitar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, susunan organisasi Sekretariat Daerah Kota Blitar terdiri dari:

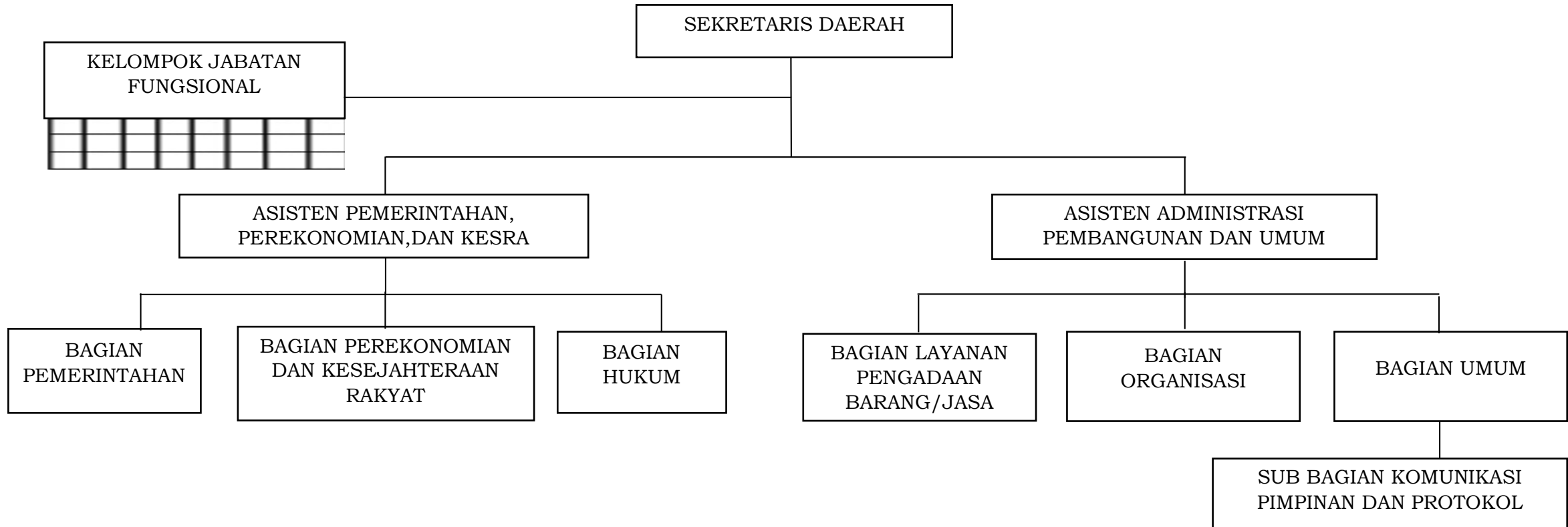
- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 1. Bagian Pemerintahan, membawahi:
 2. Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
 3. Bagian Hukum, membawahi :
- c. Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum, terdiri dari:
 1. Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa, membawahi;
 2. Bagian Organisasi, membawahi:
 3. Bagian Umum, membawahi:

Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana pada Bagan 2.1. Sekretariat Daerah merupakan unsur Staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota Blitar. Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Untuk menjelaskan tugas dimaksud, Sekretaris Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Asisten Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat dan Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum.

Bagan 2.1
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH



Asisten Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam mengkoordinasikan perumusan kebijakan, fasilitasi dan pengendalian sekaligus melaporkan hasil pelaksanaan tugas pemerintah daerah pada Bagian Pemerintahan, Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, dan Bagian Hukum serta mengkoordinasikan perumusan kebijakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, transmigrasi, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pendidikan, kesehatan, sosial, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana, koperasi dan UKM, kepemudaan dan olah raga, pariwisata, kebudayaan, ketahanan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, dan urusan penunjang kepegawaian dan sumber daya manusia, pengawasan serta BUMD dan koordinasi kerukunan umat beragama.

Untuk menjalankan tugas dimaksud, Asisten Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, hukum serta perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
- b. Pengkoordinasian perumusan kebijakan di bidang pemerintahan, hukum serta perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, hukum, perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
- d. Pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang pemerintahan, hukum, perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, hukum, perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang pemerintahan, hukum, perekonomian dan kesejahteraan rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Asisten Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat dibantu oleh:

- a. Bagian Pemerintahan;
- b. Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;
- c. Bagian Hukum.

Adapun tugas dari masing masing bagian adalah sebagai berikut:

a. Bagian Pemerintahan

Bagian Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah dan kerja sama. Untuk menjalankan tugas dimaksud Bagian Pemerintahan melaksanakan fungsi:

1. Penyusunan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan pada sub bagian administrasi pemerintahan, sub bagian administrasi kewilayahan dan sub bagian otonomi daerah dan kerja sama;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah dan kerja sama;
3. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan

dan otonomi daerah dan kerja sama;

4. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta kecamatan dan kelurahan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Sekretaris Daerah;
 5. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal daerah;
 6. Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi penyelenggaraan urusan di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah dan kerja sama;
 7. Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan sisa skala kota;
 8. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah dan kerja sama;
 9. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah dan kerja sama; dan
 10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.
- b. Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang perekonomian, keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Dalam menjalankan tugas dimaksud, Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat melaksanakan fungsi:

1. Penyusunan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan pada sub bagian perekonomian, sub bagian bina mental spiritual dan sub bagian kesejahteraan sosial dan masyarakat;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang perekonomian, keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
3. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perekonomian, keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
4. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah yang menangani urusan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, sosial, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, ketenagakerjaan, transmigrasi, perlindungan perempuan dan anak, keluarga berencana, koperasi dan UMKM, pemuda dan olah raga, perpustakaan, kearsipan, pariwisata, ketahanan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, ESDM, perdagangan, dan perindustrian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Sekretaris Daerah;
5. Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi penyelenggaraan urusan di bidang perekonomian, keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
6. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang

perekonomian, keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;

7. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perekonomian, keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

c. Bagian Hukum

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi hukum. Dalam menjalankan tugas dimaksud Bagian Hukum mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan pada sub bagian perundang-undangan, sub bagian bantuan hukum dan sub bagian dokumentasi dan informasi;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi hukum;
3. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi hukum;
4. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi hukum;
5. Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi penyelenggaraan urusan di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi hukum;
6. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi hukum;
7. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum

Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam mengkoordinasikan perumusan kebijakan, fasilitasi serta pengendalian sekaligus melaporkan hasil pelaksanaan tugas pemerintah daerah pada Bagian Umum, Bagian Organisasi, dan Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa serta mengkoordinasikan perumusan kebijakan urusan komunikasi dan informatika, statistik, persandian, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan permukiman, lingkungan hidup, kehutanan, perhubungan, ESDM, dan urusan penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan, keuangan serta fasilitasi pimpinan dan forum pimpinan daerah.

Dalam menjalankan tugas dimaksud Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan daerah di bidang administrasi pembangunan,

- layanan pengadaan barang/jasa, organisasi dan umum;
- b. Pengkoordinasian perumusan kebijakan di bidang administrasi pembangunan, layanan pengadaan barang/jasa, organisasi dan umum;
 - c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang administrasi pembangunan, layanan pengadaan barang/jasa, organisasi dan umum;
 - d. Pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pembangunan dan layanan pengadaan barang/jasa, organisasi dan umum;
 - e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pembangunan, layanan pengadaan barang/jasa, organisasi dan umum;
 - f. Penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan ASN pada instansi daerah;
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang administrasi pembangunan, layanan pengadaan barang/jasa, organisasi, umum, yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum dibantu oleh:

- a. Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Bagian Organisasi;
- c. Bagian Umum.

Adapun tugas dan fungsi masing-masing bagian adalah sebagai berikut:

- a. Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa

Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang penyusunan dan pengendalian program pembangunan serta menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa. Dalam menjalankan tugas dimaksud Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa mempunyai fungsi:

- 1. Penyusunan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan pada sub bagian penyusunan dan pengendalian program, sub bagian pengadaan barang / jasa, sub bagian LPSE;
- 2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang penyusunan dan pengendalian program pembangunan, pengadaan barang/jasa;
- 3. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang penyusunan dan pengendalian program pembangunan, pengadaan barang/ jasa;
- 4. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan permukiman, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, lingkungan hidup, kehutanan, perhubungan, dan urusan penunjang keuangan, perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- 5. Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi penyelenggaraan urusan di bidang penyusunan dan pengendalian program pembangunan, pengadaan barang / jasa;
- 6. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang penyusunan dan pengendalian program pembangunan, pengadaan barang/ jasa;

7. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan perkembangan kemajuan/progres pelaksanaan pembangunan daerah;
 8. Pengoordinasian pendokumentasi kegiatan pembangunan daerah;
 9. Pengelolaan pengadaan barang/jasa ;
 10. Pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;
 11. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) ;
 12. Pelaksanaan penugasan Pejabat Pengadaan Barang /Jasa di lingkungan Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pengadaan langsung di satuan kerja/organisasi perangkat daerah atas permintaan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 13. Pelaksanaan penugasan anggota Pokja Pemilihan untuk melaksanakan fungsi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa dan fungsi penyusunan dan pengelolaan katalog lokal;
 14. Penyusunan dan penyampaian laporan periodik seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Walikota;
 15. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyusunan dan pengendalian program pembangunan, pengadaan barang dan jasa; dan
 16. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum yang berkaitan dengan tugasnya.
- b. Bagian Organisasi;
- Bagian Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, kinerja dan reformasi birokrasi. Untuk menjalankan tugas dimaksud, Bagian Organisasi mempunyai fungsi:
1. Penyusunan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan pada sub bagian kelembagaan dan analisis jabatan, sub bagian pelayanan publik dan tata laksana, serta sub bagian kinerja dan reformasi birokrasi;
 2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
 3. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
 4. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kepegawaian, kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
 5. Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi penyelenggaraan urusan di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
 6. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
 7. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi; dan

8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

c. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan serta evaluasi di bidang rumah tangga dan perlengkapan, komunikasi pimpinan dan protokol, dan tata usaha pimpinan dan keuangan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Bagian Umum mempunyai fungsi:

1. Penyusunan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan pada sub bagian rumah tangga dan perlengkapan, sub bagian komunikasi pimpinan dan protokol dan sub bagian tata usaha pimpinan dan keuangan;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rumah tangga dan perlengkapan, komunikasi pimpinan dan protokol, serta tata usaha pimpinan dan keuangan di lingkungan Sekretariat Daerah;
3. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang rumah tangga dan perlengkapan, komunikasi pimpinan dan protokol, serta tata usaha pimpinan dan keuangan di lingkungan Sekretariat Daerah;
4. Pelaksanaan sosialisasi, konsultasi penyelenggaraan urusan di bidang rumah tangga dan perlengkapan, komunikasi pimpinan dan protokol, serta tata usaha pimpinan dan keuangan di lingkungan Sekretariat Daerah;
5. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang rumah tangga dan perlengkapan, komunikasi pimpinan dan protokol, serta tata usaha pimpinan dan keuangan di lingkungan Sekretariat Daerah;
6. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang rumah tangga dan perlengkapan, komunikasi pimpinan dan protokol, serta tata usaha pimpinan dan staf ahli; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

2.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah Kota Blitar

Sumber Daya yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah Kota Blitar terdiri dari Sumber Daya Manusia dan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah Kota Blitar.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia/aparatur pada Sekretariat Daerah adalah sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) orang dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 2.2.1.1
Komposisi Aparatur Sekretariat Daerah
Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	URAIAN	L	P	TOTAL
1	SETDA	3	1	4
2	BAGIAN PEMERINTAHAN	5	4	9
3	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESRA	5	4	9
4	BAGIAN HUKUM	3	5	8
5	BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA	10	5	15
6	BAGIAN ORGANISASI	3	5	8
7	BAGIAN UMUM	20	14	34
	JUMLAH	49	38	87

Sumber : BKPSDM Kota Blitar, 2023

Tabel 2.2.1.2
Komposisi Aparatur Sekretariat Daerah
Berdasarkan Eselon

NO	URAIAN	ESELON												TOTAL
		II A		IIB		IIIA		IIIB		IVA		IVB		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	SETDA	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4
2	BAGIAN PEMERINTAHAN	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
3	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESRA	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
4	BAGIAN HUKUM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
5	BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
6	BAGIAN ORGANISASI	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
7	BAGIAN UMUM	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2
JUMLAH		1	0	2	1	6	0	0	0	1	0	0	0	11

Sumber : BKPSDM Kota Blitar, 2023

Tabel 2.2.1.3
Komposisi Aparatur Sekretariat Daerah
Berdasarkan Pendidikan

NO	URAIAN	PENDIDIKAN												TOTAL
		SD		SLTP		SLTA		DIPLOMA		S1		S2		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	SETDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	4
2	BAGIAN PEMERINTAHAN	0	0	0	0	0	2	0	0	4	2	1	0	9
3	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESRA	0	0	0	0	2	0	0	0	2	4	1	0	9
4	BAGIAN HUKUM	0	0	0	0	0	2	0	0	2	3	1	0	8
5	BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA	0	0	0	0	0	0	1	0	8	5	1	0	15
6	BAGIAN ORGANISASI	0	0	0	0	1	1	0	0	0	4	2	0	8
7	BAGIAN UMUM	1	0	1	0	6	9	4	2	6	3	2	0	34
JUMLAH		1	0	1	0	9	14	5	2	22	21	11	1	87

Sumber : BKPSDM Kota Blitar, 2023

Tabel 2.2.1.4
Komposisi Aparatur Sekretariat Daerah
Berdasarkan Golongan

NO	URAIAN	GOLONGAN								TOTAL
		I		II		III		IV		
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1	SETDA	0	0	0	0	0	0	3	1	4
2	BAGIAN PEMERINTAHAN	0	0	0	2	4	2	1	0	9

NO	URAIAN	GOLONGAN								TOTAL
		I		II		III		IV		
		L	P	L	P	L	P	L	P	
3	BAGIAN PEREKONOMIAN KESRA	0	0	2	0	2	4	1	0	9
4	BAGIAN HUKUM	0	0	0	0	2	5	1	0	8
5	BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA	0	0	1	0	7	5	1	0	14
6	BAGIAN ORGANISASI	0	0	1	0	1	5	1	0	8
7	BAGIAN UMUM	1	0	11	9	7	4	1	0	33
JUMLAH										85

Sumber : BKPSDM Kota Blitar, 2023
Keterangan :1 PPPK dan 1 PTT

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagaimana pada table berikut ini:

Tabel 2.2.2.1
Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah

Kode				Nama Bidang Barang	Keadaan Akhir (31 Desember 2021)		
					Jumlah	Satuan	Nilai (Rp)
1				ASET	3.826	Buah	96.768.048.681,37
1	3			ASET TETAP	3.631	Buah	95.341.290.352,87
1	3	1		TANAH	14	Buah	45.507.976.000
1	3	2		PERALATAN DAN MESIN	3.259	Buah	30.755.675.618,07
1	3	3		GEDUNG DAN BANGUNAN	31	Buah	17.556.179.034,62
1	3	4		JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	6	Buah	953.774.100,00
1	3	5		ASET TETAP LAINNYA	321	Buah	567.685.600,18
1	3	6		KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	0	Buah	0,00
1	5			ASET LAINNYA	195	Buah	1.426.758.328,50
1	5	3		ASET TIDAK BERWUJUD	17	Buah	717.080.600,00
1	5	4		ASET LAIN-LAIN	178	Buah	709.677.728,50
TOTAL					3.826		96.768.048.681,37

Sumber : BPKAD Kota Blitar, 2022

2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Blitar

Capaian kinerja Sekretariat Daerah pada periode Renstra sebelumnya pada periode 2015-2021 adalah sebagaimana disajikan pada Tabel 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Blitar dan Tabel 2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Blitar sebagai berikut:

Tabel 2.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Blitar

[illegible]

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS	TAR GET NSPK	TAR GET IKK	TARGET INDIKA TOR LAINNYA	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
6	Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang Perekonomian	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang Administrasi Pembangunan	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	93%	100%	100%	100%	100%	100%	93%	100%	100%	100%
9	Nilai SAKIP Setda	-	-	-	B	B	B	B	B	B	CC	BB	BB	A	A	A	0%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Persentase pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui e-procurement	-	-	-	89%	90%	91%	92%	93%	94%	96,69%	89%	86,36%	92,86%	58,24%	56,79%	109%	99%	95%	101%	63%	60,41%
11	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan surat menyurat dan arsip	-	-	-	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	SANGAT BAIK	BAIK	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS	TAR GET NSPK	TAR GET IKK	TARGET INDIKA TOR LAINNYA	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan sarana dan prasarana	-	-	-	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan administrasi keuangan	-	-	-	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	SANGAT BAIK	BAIK	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan kerumahtang gaan	-	-	-	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan kehumasan dan keprotokolan	-	-	-	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	SANGAT BAIK	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.3.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Blitar

NO.	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN						REALISASI CAPAIAN TAHUN						RASIO CAPAIAN PADA TAHUN						RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	ANGGARAN	REALISASI
1	PENDAPATAN	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000	7.000.000	7.000.000	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000	7.000.000	7.000.000	0%	100%	100%	100%	100%	100%	20,00%	20,00%
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000	7.000.000	7.000.000	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000	7.000.000	7.000.000	0%	100%	100%	100%	100%	100%	20,00%	20,00%
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,00%
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,00%
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,00%
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000	7.000.000	7.000.000	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000	7.000.000	7.000.000	0%	100%	100%	100%	100%	100%	20,00%	20,00%
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,00%
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,00%
	JUMLAH PENDAPATAN	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000	7.000.000	7.000.000	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000	7.000.000	7.000.000	0%	100%	100%	100%	100%	0%	20,00%	20,00%
2	BELANJA	33.261.132.396	41.026.167.286	41.873.394.310	39.865.168.485	34.984.312.925	45.724.536.241	31.087.392.122	37.407.616.144	36.165.913.696	35.818.734.603	30.618.021.103	41.400.209.534	93%	91%	86%	90%	88%	91%	3,15%	3,28%

NO.	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN						REALISASI CAPAIAN TAHUN						RASIO CAPAIAN PADA TAHUN						RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	ANGGARAN	REALISASI
2.1	BELANJA OPERASI	29.839.856,096	37.170.232,236	39.454.120,570	37.981.314,665	33.661.868,925	40.907.082,641	27.815.432,237	33.927.437,256	33.972.555,076	34.065.473,889	29.373.050,001	36.888.425,882	93%	91%	86%	90%	87%	90%	2,51%	2,44%
2.1.1	Belanja Pegawai	8.288.730,919	7.888.714,500	8.305.742,315	9.649.759,876	9.157.902,497	10.256.971,593	7.765.514,520	6.655.694,022	6.857.300,209	10.361.755,358	8.146.497,643	10.085.674,557	94%	84%	83%	107%	89%	98%	5,67%	11,31%
2.1.2	Belanja Barang	21.551.125,177	29.281.517,736	31.148.378,255	28.331.554,789	24.503.966,428	30.650.111,048	20.049.917,717	27.271.743,234	27.115.254,867	23.703.718,531	21.226.552,358	26.802.751,325	93%	93%	87%	84%	87%	87%	1,78%	0,53%
2.2	BELANJA MODAL	3.421.276,300	3.855.935,050	2.419.273,740	1.883.853,820	1.322.444,000	4.817.453,600	3.271.959,885	3.480.178,888	2.193.358,620	1.753.260,714	1.244.971,102	4.511.783,652	96%	90%	91%	93%	94%	94%	35,02%	35,27%
2.2.1	Belanja Tanah	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,00%
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	1.629.908,800	1.961.714,050	2.113.857,740	1.133.487,820	1.211.439,000	4.758.453,600	1.561.500,385	1.637.635,888	1.914.109,620	1.034.101,214	1.136.795,302	4.452.863,743	96%	83%	91%	91%	94%	94%	52,21%	54,51%
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	1.727.500,000	1.696.741,000	180.836,000	615.466,000	80.440,000	59.000,000	1.648.094,500	1.646.053,000	176.694,000	610.793,700	80.260,000	58.919,910	0%	97%	98%	99%	100%	99,9%	7,48%	8,59%

[illegible]

NO.	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN						REALISASI CAPAIAN TAHUN						RASIO CAPAIAN PADA TAHUN						RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	ANGGARAN	REALISASI
3.2	PENGELUARAN DAERAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%
	Jumlah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%
	Pembiayaan Netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	-33.261.132.396	-41.026.167.286	-41.873.394.310	-39.865.168.485	-34.984.312.925	-45.724.536.241	-31.087.392.122	-37.407.616.144	-36.165.913.696	-35.818.734.603	-30.618.021.103	-41.400.209.534	93%	91%	86%	90%	88%	91%	3,15%	3,28%

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Daerah

Tantangan dan peluang dalam mengembangkan pelayanan Sekretariat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4.1
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah

ANALISA LINGKUNGAN EKSTERNAL		
NO	PELUANG	TANTANGAN
1	Terkoordinasinya antara masyarakat dengan pemerintah, dan antara pemerintah dengan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan bermitra kerja terhadap proses pembangunan sosial, merupakan suatu peluang dalam mewujudkan pembangunan kesejahteraan sosial yang komprehensif dan berkelanjutan	Mengingat belum seluruhnya masyarakat dan lembaga sosial kemasyarakatan yang terlibat aktif dalam proses pembangunan urusan sosial, maka merupakan suatu tantangan untuk mengoptimalkan peran aktif lembaga sosial kemasyarakatan dan keagamaan melalui regulasi kebijakan sosial
2	Adanya data-data urusan sosial kemasyarakatan yang akurat memberikan kelancaran dalam penyampaian informasi yang cepat dan tepat, serta memudahkan dalam penyusunan kebijakan social	Populasi yang tidak terkendali dapat memicu timbulnya permasalahan sosial, diantaranya meningkatnya jumlah rumah tangga miskin, pencari kerja (pengangguran), dan masalah sosial lainnya
3	Keterlibatan OPD terkait dalam penanganan masalah sosial merupakan peluang dalam melakukan sinkronisasi program dan kegiatan guna menghindari terjadinya tumpang tindih pelaksanaannya	Merupakan suatu tantangan dalam memadukan data dan informasi, mengingat masing-masing OPD berpedoman pada tugas pokok dan fungsi yang selama ini dijalankan
4	Dinamisnya produk hukum menjamin adanya kepastian hukum bagi pengambil kebijakan di daerah	Pemerintah daerah harus menganalisa dan mengkaji produk hukum sebelum menerapkannya di daerah sehingga meminimalkan terjadinya kesalahan dan konflik di masyarakat
5	Teknologi informasi di bidang hukum yang semakin berkembang memudahkan terpublikasinya produk hukum sehingga dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat	Tuntutan transparansi kepada Pemerintah Daerah sehingga diperlukan kecermatan dan ketelitian sebelum produk hukum dipublikasikan melalui media yang dapat di akses masyarakat
6	Dinamisnya perkembangan ilmu hukum memudahkan pengambil kebijakan dalam merumuskan kebijakan bagi permasalahan di daerah yang semakin kompleks	Perlunya penguatan kualitas SDM aparatur bagian hukum sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan dan kualitas analisa hukum sebagai bahan pengambilan kebijakan daerah
7	Deregulasi media massa dan perkembangan teknologi media massa menjadikan informasi pemerintahan dan pembangunan semakin mudah diproduksi dan disebarluaskan kepada masyarakat.	Berlakunya Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik mengharuskan Pemerintah Daerah sebagai Badan Publik dengan segala hak dan kewajibannya.
8	Semakin menguatnya pemahaman aparatur pemerintah dan masyarakat terhadap tata aturan keprotokolan menjadikan acara dan	Berlakunya Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan mengharuskan penataan kembali dalam hal tata tempat, tata penghormatan, tata upacara serta

ANALISA LINGKUNGAN EKSTERNAL		
NO	PELUANG	TANTANGAN
	kegiatan lebih tertib dan sesuai standard dan etika keprotokolan.	memerlukan adaptasi dan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan.
9	Saat ini kelembagaan sudah ada dan terus disesuaikan dengan peraturan perundangan tentang Organisasi Perangkat Daerah	Belum adanya mekanisme tata kerja yang diatur resmi.
10	Adanya kemudahan dalam akses dan pengambilan data yang terintegrasi	Pemanfaatan Aplikasi terpusat baik terkait Perencanaan, Penatausahaan Keuangan, Pelaporan maupun Monitoring dan evaluasi
11	Adanya pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah kepada Kecamatan dan Kelurahan	Perlunya koordinasi dan sinkronisasi yang lebih erat terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan Kecamatan dan Kelurahan

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Blitar

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dapat dirumuskan pada Tabel berikut ini:

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan Sekretariat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kurang optimalnya peran serta pemerintah daerah dalam mewujudkan dukungan mental spiritual	Belum tersusun dan tersosialisasikannya kebijakan yang mendukung pembinaan mental spiritual masyarakat
		Belum optimalnya Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Belum tersusunnya peta kebijakan Kesejahteraan Sosial Kota Blitar
			Belum dilaksanakannya Evaluasi dan pengukuran Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
		Belum optimalnya Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Belum tersusunnya peta kebijakan Kesejahteraan Masyarakat Kota Blitar
2	Belum optimalnya kebijakan bidang Ekonomi Kota Blitar	Kurang optimalnya koordinasi terkait bidang perekonomian	Belum tersusunnya peta kebijakan perekonomian Kota Blitar
			Belum adanya Tim Ekonomi Kota Blitar
			Belum optimalnya Monitoring dan Evaluasi pengelolaan BUMD dan BLUD
3	Belum Optimalnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Belum tertibnya Administrasi Pemerintahan	Belum Optimalnya koordinasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan, Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Kerja Sama Daerah
			Belum Optimalnya monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Administrasi Kewilayahan
4	Belum terpenuhinya kebutuhan produk hukum dalam penyelenggaraan	Belum tersosialisasikannya penyusunan perencanaan produk hukum daerah	Belum terlaksananya identifikasi, analisis dan pemetaan produk hukum daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Pemerintah Daerah		
5	Belum terinternalisasinya reformasi birokrasi	Perlunya perubahan substansi terkait sasaran reformasi birokrasi, kegiatan reformasi birokrasi berdampak, fokus pelaksanaan reformasi birokrasi dan penajaman indikator reformasi birokrasi mengacu pada PermenPAN dan RB Nomor 3 Tahun 2023 serta PermenPAN dan RB Nomor 9 Tahun 2023	Belum optimalnya koordinasi dan pembinaan reformasi birokrasi general dan tematik mengacu pada PermenPAN dan RB Nomor 3 Tahun 2023 serta PermenPAN dan RB Nomor 9 Tahun 2023 dengan mengutamakan dampak serta kolaborasi dalam menyusun rencana aksi dan pelaksanaan RB
6	Belum Optimalnya Kebijakan Program Pembangunan Daerah	Belum Optimalnya manajemen pelaksanaan program pembangunan	Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan
7	Belum Optimalnya Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	Masih lemahnya perencanaan pengadaan barang/jasa	Belum optimalnya pembinaan kepada pelaku pengadaan barang/jasa
			Belum tercapainya Kematangan UKPBJ level 3
			Belum optimalnya pembinaan dan advokasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa
			Kurang optimalnya pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik
8	Kurang optimalnya layanan administrasi umum	Kurang optimalnya layanan kerumahtanggaan	Belum terintegrasinya layanan pemanfaatan kendaraan
		Kurang optimalnya layanan penatausahaan	Belum optimalnya waktu penyelesaian pelayanan surat menyurat disebabkan menyesuaikan agenda pimpinan
9	Kurang Optimalnya Layanan Komunikasi Pimpinan dan Keprotokolan	Belum optimalnya komunikasi pimpinan dengan media massa	Kurang intensifnya pembinaan terhadap insan media massa
		Belum optimalnya acara daerah yang sesuai standar keprotokolan	Kurangnya pembinaan, sosialisasi, dan pendampingan tentang standar keprotokolan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
10	Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat	Belum optimalnya koordinasi pemberdayaan masyarakat	Belum optimalnya pembinaan pemberdayaan kemasyarakatan

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026 bahwa Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar adalah

“Terwujudnya Kota Blitar Keren, Unggul, Makmur, Bermartabat”

Dalam mewujudkan visi tersebut dirumuskanlah 5 (lima) Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender dan Berkepribadian dalam Kebudayaan.
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter.
3. Mewujudkan Berdikari secara ekonomi yang Berorientasi pada Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan Berbasis Digital.
4. Mewujudkan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan.
5. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi.

Misi yang sesuai dengan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah adalah Misi Kesatu yaitu Mewujudkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender dan Berkepribadian dalam Kebudayaan dan Misi Kelima yaitu Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pelayanan Sekretariat Daeah Kota Blitar, faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Sekretariat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi Wali Kota Blitar dapt disajikan melalui Tabel berikut ini:

Tabel 3.2.1

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Sekretariat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Wali Kota Blitar dan Wakil Wali Kota Blitar

NO	MISI WALI KOTA BLITAR DAN WAKIL WALI KOTA BLITAR	PERMASALAHAN	FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG
1	Mewujudkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender dan Berkepribadian dalam Kebudayaan	Kurang optimalnya peran serta pemerintah daerah dalam mewujudkan dukungan mental spiritual	Belum tersusun dan tersosialisasikannya kebijakan yang mendukung pembinaan mental spiritual masyarakat	Peningkatan peran lembaga keagamaan melalui fasilitasi koordinasi Lembaga keagamaan
5	Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik dan	Belum optimalnya Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan	Belum tersusunnya peta kebijakan Kesejahteraan Sosial Kota Blitar	Koordinasi dengan Perangkat Daerah yang

NO	MISI WALI KOTA BLITAR DAN WAKIL WALI KOTA BLITAR	PERMASALAHAN	FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG
	Bersih Berbasis Teknologi Informasi	Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Belum dilaksanakannya Evaluasi dan pengukuran Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	membidangi kesejahteraan Sosial berjalan dengan baik
		Belum optimalnya Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Belum tersusunnya peta kebijakan Kesejahteraan Masyarakat Kota Blitar	Kooordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi kesejahteraan Masyarakat berjalan dengan baik
			Belum dilaksanakannya Evaluasi dan pengukuran Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	
		Kurang optimalnya koordinasi terkait bidang perekonomian	Belum tersusunnya peta kebijakan perekonomian Kota Blitar	Tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup baik dibandingkan dengan kabupaten/kota disekitar Kota Blitar
			Belum adanya Tim Ekonomi Kota Blitar	
			Belum optimalnya Monitoring dan Evaluasi pengelolaan BUMD dan BLUD	Perkembangan kinerja BUMD menuju kearah yang lebih baik
		Belum tertibnya Administrasi Pemerintahan	Belum Optimalnya koordinasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan, Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Kerja Sama Daerah	Peraturan perundangan berkenaan telah diterbitkan oleh Kementrian Dalam Negeri
			Belum Optimalnya monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Administrasi Kewilayahan	
		Belum tersosialisasikannya penyusunan perencanaan produk hukum daerah	Belum terlaksananya identifikasi, analisis dan pemetaan produk hukum daerah	Koordinasi yang baik dengan Perangkat Daerah terkait, DPRD maupun dengan Provinsi Jawa Timur

NO	MISI WALI KOTA BLITAR DAN WAKIL WALI KOTA BLITAR	PERMASALAHAN	FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG
		Perlunya perubahan substansi terkait sasaran reformasi birokrasi, kegiatan reformasi birokrasi berdampak, fokus pelaksanaan reformasi birokrasi dan penajaman indikator reformasi birokrasi mengacu pada PermenPAN dan RB Nomor 3 Tahun 2023 serta PermenPAN dan RB Nomor 9 Tahun 2023	Belum optimalnya koordinasi dan pembinaan reformasi birokrasi general dan tematik mengacu pada PermenPAN dan RB Nomor 3 Tahun 2023 serta PermenPAN dan RB Nomor 9 Tahun 2023 dengan mengutamakan dampak serta kolaborasi dalam menyusun rencana aksi dan pelaksanaan RB	Komitmen tinggi dari personil Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
		Belum Optimalnya manajemen pelaksanaan program pembangunan	Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan	
		Masih lemahnya perencanaan pengadaan barang/jasa	Belum optimalnya pembinaan kepada pelaku pengadaan barang/jasa	
			Belum tercapainya Kematangan UKPBJ level 3	
			Belum Optimalnya pembinaan dan advokasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa	
			Kurang optimalnya pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik	
		Kurang optimalnya layanan kerumahtanggaan	Belum terintegrasinya layanan pemanfaatan kendaraan	
		Kurang optimalnya layanan penatausahaan	Belum optimalnya waktu penyelesaian pelayanan surat menyurat disebabkan menyesuaikan agenda pimpinan	
		Belum optimalnya komunikasi pimpinan dengan media massa	Kurang intensifnya pembinaan terhadap insan media massa	

NO	MISI WALI KOTA BLITAR DAN WAKIL WALI KOTA BLITAR	PERMASALAHAN	FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG
		Belum optimalnya acara daerah yang sesuai standar keprotokolan	Kurangnya pembinaan, sosialisasi, dan pendampingan tentang standar keprotokolan	
		Belum optimalnya koordinasi pemberdayaan masyarakat	Belum Optimalnya pembinaan pemberdayaan kemasyarakatan	

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra SKPD Provinsi Terkait

Keterkaitan capaian kinerja yang diinginkan dicapai oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi yang perlu didukung oleh Pemerintah Daerah diantaranya adalah :

Rencana Strategis Kementerian PANRB

Visi Kementerian PANRB Tahun 2020 – 2024 yaitu : “Mewujudkan Aparatur Negara yang Profesional dan Berintegritas Tinggi untuk Mencapai Pemerintahan yang Berkelas Dunia dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan visi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian yang berlandaskan Gotong-Royong”.

Misi Kementerian PANRB yang terkait dengan kinerja Sekretariat Daerah Kota Blitar yaitu :

1. Menciptakan Kelembagaan dan Tata Kelola Birokrasi yang Ramping, Lincah, Terintegrasi dan Berbasis Elektronik – *digital bureaucracy*
2. Mengembangkan Sistem Manajemen Kinerja Instansi Pemerintah yang Transparan dan Akuntabel
3. Mewujudkan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel dan Melayani
4. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Reformasi Birokrasi.

Rencana Strategis Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri

Visi Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024 yaitu : “Efisiensi dan Efektifitas Penyelenggaraan Otonomi Daerah oleh Penyelenggara Pemerintah Daerah Di Bidang Penataan Daerah, Kelembagaan, Kepegawaian Perangkat Daerah, Produk Hukum Daerah, Evaluasi Kinerja dan Otsus/Istimewa”

Misi Ditjen Otonomi Daerah yang terkait dengan kinerja Sekretariat Daerah Kota Blitar yaitu :

1. Meningkatnya Kinerja Evaluasi Penyelenggaraan dan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah serta Kinerja Penyelenggara Pemerintahan Daerah
2. Meningkatnya Kualitas Penataan Kelembagaan dan Kepegawaian pada Perangkat Daerah serta Kualitas Produk Hukum Daerah

Perubahan Rencana Strategis Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 yaitu : “Terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui kerja bersama dan semangat gotong royong”.

Misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang terkait dengan tugas dan fungsi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Blitar yaitu : “Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai Prinsip Kebhinekaan”

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, pariwisata dan ekonomi kreatif. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis meliputi kajian fungsi, kedudukan, kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang. Adapun faktor penghambat dan pendorong dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada Tabel 3.4.1 sebagai berikut:

Tabel 3.4.1
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis beserta Faktor Penghambat dan Pendorong dalam
Pelayanan Sekretariat Daerah

No	Rencana Tata Ruang Kota Blitar sesuai Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah	Permasalahan dalam Pelayanan Sekretariat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Pengembangan pusat-pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang hubungan antar kawasan	Belum optimalnya koordinasi dalam penyusunan kebijakan daerah	Kurangnya pemahaman OPD bahwa Sekretariat Daerah adalah pengoordinasi kebijakan daerah	Fungsi Sekretariat Daerah sebagai pelayan administratif instansi daerah
2	Peningkatan penyediaan ruang terbuka hijau			

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dalam penentuan isu-isu yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah dilaksanakan review kembali faktor-faktor dari pelayanan Sekretariat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah sebagai berikut:

3.5.1 Gambaran pelayanan Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Sebagai Organisasi penyusun kebijakan Sekretariat Daerah memegang

kunci arah kebijakan Kota Blitar, hal ini tentunya banyak memperoleh hambatan maupun tantangan.

3.5.2 Sasaran jangka menengah pada Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur

Sasaran Jangka Menengah Provinsi Jawa Timur pada RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 yang relevan dengan Tugas Fungsi Sekretariat Daerah adalah:

- a. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel
- b. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah.

3.5.3 Implikasi RTRW bagi pelayanan Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah yang memiliki tugas membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif sebenarnya tidak memiliki implikasi langsung terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah, namun setiap kebijakan yang dikeluarkan harus selalu mempertimbangkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah diterbitkan produk hukumnya sehingga pembangunan di Kota Blitar berjalan sesuai koridornya.

3.5.4 Implikasi KLHS bagi pelayanan Sekretariat Daerah

Seperti halnya terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah, Implikasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis terhadap pelayanan Sekretariat Daerah tidak memiliki implikasi secara langsung, namun setiap kebijakan yang dikeluarkan harus selalu mempertimbangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis sehingga Pembangunan Kota Blitar akan berwawasan lingkungan guna peningkatan kualitas tata ruang serta peningkatan daya dukung lingkungan.

Dari uraian diatas dapat dirumuskan isu-isu strategis di Sekretariat Daerah sebagai berikut:

- a. Isu terkait penyelenggaraan pemerintahan
 1. Belum terpenuhinya kebutuhan akan produk hukum yang berkualitas dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah
 2. Belum tersedianya data yang akurat sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan di bidang Kesejahteraan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial
 3. Belum dilaksanakannya evaluasi atas implementasi kebijakan bidang pemerintahan, kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan sosial.
 4. Belum optimalnya pelaksanaan dan pemberdayaan masyarakat
- b. Isu terkait perekonomian dan pembangunan
 1. Belum tersedianya roadmap kebijakan bidang perekonomian di Kota Blitar
 2. Belum dilaksanakannya evaluasi atas implementasi kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan
 3. Pengadaan Barang/Jasa yang memenuhi kinerja pengadaan melalui *e-procurement* bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
- c. Isu terkait Administrasi Umum dan pelayanan publik
 1. Belum terinternalisasinya reformasi birokrasi general dan tematik berdasarkan PermenPAN dan RB Nomor 3 Tahun 2023 dan PermenPAN dan RB Nomor 9 Tahun 2023
 2. Perlunya peningkatan layanan Administrasi Umum diantaranya keprotokolan, kerumahtanggaan dan penatausahaan persuratan Sekretariat Daerah.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah Kota Blitar

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan harus memenuhi kriteria dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, dan disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

Dengan berpedoman pada RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026, serta berdasarkan pada hasil pemetaan Pohon Kinerja maka Gambaran mengenai Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2022-2023 dapat dilihat pada Tabel 4.1 serta penyesuaian tujuan dan sasaran Tahun 2024-2026 sesuai hasil pemetaan Pohon kinerja dapat dilihat pada Tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2022 - 2023

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	DATA AWAL 2020	TARGET DAN REALISASI KINERJA TUJUAN/SASARAN			
								2022		2023	
								Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Keadaan hubungan antarumat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian dan saling menghormati dalam pengamalan ajaran agama serta kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) diukur melalui 4 indikator: 1.Toleransi Toleransi merupakan sikap saling mengizinkan dan menghormati keyakinan orang lain tanpa memerlukan persetujuan 2.Kesetaraan Kesetaraan memandang bahwa setiap manusia dilahirkan setara, meskipun memiliki keragaman identitas baik dari suku, bangsa, agama, dan sebagainya. 3.Kerjasama Kerjasama merupakan perhatian, kepedulian, hubungan yang akrab dan merasa senasib sepenanggungan. 4.Peran Pemerintah Peran pemerintah merupakan upaya intervensi pemerintah dalam kegiatan atau sisi-sisi keagamaan masyarakatnya	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) pada tahun bersangkutan	Indeks	84,38	83,6	85,15	84,89	85,15*
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan	Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola <i>input</i> untuk	Jumlah kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang diimplementasikan dibagi jumlah seluruh kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan x 100 %	persen	100	100	100	100	100

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	DATA AWAL 2020	TARGET DAN REALISASI KINERJA TUJUAN/SASARAN			
								2022		2023	
								Target	Realisasi	Target	Realisasi
			yang diimplementasikan	menghasilkan <i>output</i> atau <i>outcomes</i> bagi masyarakat atau pengguna kebijakan							
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah		Nilai SAKIP	Indikator yang mengukur tingkat kualitas implementasi manajemen kinerja organisasi guna mewujudkan budaya akuntabilitas kinerja organisasi yang baik dan dapat mampu mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran APBD	Penilaian atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh KemenPAN RB	nilai	BB (72,06)	BB (72,15)	BB (73,73)	BB (73,74)	BB (74,79)
		Terwujudnya internalisasi kinerja organisasi	Persentase OPD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi (penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik)	Penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi meliputi penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik	Jumlah OPD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi (penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik) dibagi jumlah seluruh OPD x 100%	persen	34,48	55,17	76,67	65,52	80,00
			Status EKPPD	Nilai yang diperoleh dari hasil evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penilaian atas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah oleh Kemendagri	nilai	Sangat Tinggi (3,35)	Sangat Tinggi (3,35)	Sedang (3,06)	Sangat Tinggi (3,3532)	Tinggi (3,4243)

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	DATA AWAL 2020	TARGET DAN REALISASI KINERJA TUJUAN/SASARAN			
								2022		2023	
								Target	Realisasi	Target	Realisasi
		Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pembangunan	Persentase Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan	Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola <i>input</i> untuk menghasilkan <i>output</i> atau <i>outcomes</i> bagi masyarakat atau pengguna kebijakan	Jumlah Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan dibagi jumlah seluruh kebijakan bidang Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat x 100%	persen	100	100	100	100	100
			Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan	Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola <i>input</i> untuk menghasilkan <i>output</i> atau <i>outcomes</i> bagi masyarakat atau pengguna kebijakan	Jumlah Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan dibagi jumlah seluruh kebijakan bidang Administrasi Pembangunan dan Umum	persen	100	100	100	100	100
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indikator yang mengukur tingkat kepuasan masyarakat penerima layanan terhadap kualitas pelayanan. Penilaian dilakukan dengan melakukan survei eksternal kepada masyarakat penerima layanan.	Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun bersangkutan	indeks	Baik (82,39)	Baik (83,00)	Baik (84,50)	Baik (84,50) (target 2025)	Baik (85,60)
		Meningkatnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik	Persentase OPD yang telah melakukan tindak lanjut atas hasil SKM	Hasil analisa Survey Kepuasan Masyarakat perlu dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dapat dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling buruk hasilnya. Penentuan perbaikan harus direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan).	Jumlah OPD yang telah melakukan tindak lanjut atas hasil SKM pada tahun bersangkutan / Jumlah OPD x 100%	persen	10,34	20,69	100,00	27,59	100,00
			Nilai rata - rata SKM Setda	Nilai rata-rata hasil Survey Kepuasan Masyarakat atau IKM terhadap kualitas layanan Sekretariat Daerah yang terdiri dari 4 (empat) jenis layanan yakni	(Nilai SKM layanan surat menyurat dan arsip + Nilai SKM layanan sarana dan prasarana + Nilai SKM layanan	indeks		Baik (86)	Sangat Baik (91,69)	Baik (87)	Baik (86,02)

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	DATA AWAL 2020	TARGET DAN REALISASI KINERJA TUJUAN/SASARAN			
								2022		2023	
								Target	Realisasi	Target	Realisasi
				layanan surat menyurat dan arsip, layanan sarana dan prasarana, layanan kerumahtanggaan dan layanan keprotokolan	kerumahtanggaan + Nilai SKM layanan keprotokolan) / 4						
4	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Indikator yang mengukur tingkat kualitas implementasi manajemen kinerja organisasi guna mewujudkan budaya akuntabilitas kinerja organisasi yang baik dan dapat mampu mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran APBD	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat	Nilai	A (83,99)	A (86)	A (85,29)	A (87)	A (85,55)

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2024 – 2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	DATA AWAL		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN		
							2021	2022	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Keadaan hubungan antarumat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian dan saling menghormati dalam pengamalan ajaran agama serta kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) diukur melalui 4 indikator: 1.Toleransi Toleransi merupakan sikap saling mengizinkan dan menghormati keyakinan orang lain tanpa memerlukan persetujuan 2.Kesetaraan Kesetaraan memandang bahwa setiap manusia dilahirkan setara, meskipun memiliki keragaman identitas baik dari suku, bangsa, agama, dan sebagainya. 3.Kerjasama Kerjasama merupakan perhatian, kepedulian, hubungan yang akrab dan merasa senasib sepenanggungan. 4.Peran Pemerintah Peran pemerintah merupakan upaya intervensi pemerintah dalam kegiatan atau sisi-sisi keagamaan masyarakatnya	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) pada tahun bersangkutan	Indeks	84,88	85,15	83,85	84	84,25

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	DATA AWAL		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN		
							2021	2022	2024	2025	2026
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang diimplementasikan	Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarah yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola <i>input</i> untuk menghasilkan <i>output</i> atau <i>outcomes</i> bagi masyarakat atau pengguna kebijakan	Jumlah kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang diimplementasikan dibagi jumlah seluruh kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan x 100 %	persen	100	100	100	100	100
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah		Nilai SAKIP	Indikator yang mengukur tingkat kualitas implementasi manajemen kinerja organisasi guna mewujudkan budaya akuntabilitas kinerja organisasi yang baik dan dapat mampu mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran APBD	Penilaian atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh KemenPAN RB	nilai	72,25 (BB)	73,73 (BB)	BB (72,35) (target 2026)	BB (72,35) (target 2026)	BB (72,35)
			Persentase Kepala OPD yang paham atas penerapan “ <i>Good Governance</i> ”	“ <i>Good governance</i> ” atau tata kelola yang baik pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara	Jumlah Kepala OPD yang paham atas penerapan “ <i>Good Governance</i> ” dibagi jumlah seluruh Kepala OPD x 100% (penghitungan didasarkan pada: 1. Adanya dialog kinerja untuk menyelaraskan kinerja pimpinan dengan setiap jabatan 2. Penetapan kinerja individu (SKP) Jafung dan Pelaksana berdasarkan Matriks Peran Hasil dan Matriks Peran Hasil selaras/mengacu pada cascading kinerja)	persen	NA	NA	33,33	66,67	66,67
		Terwujudnya internalisasi kinerja organisasi	Persentase OPD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi	Penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi meliputi penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik	Jumlah OPD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi (penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan	persen	44,83	76,67	76,77	86,21	100

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	DATA AWAL		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN		
							2021	2022	2024	2025	2026
			(penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik)		kualitas pelayanan publik) dibagi jumlah seluruh OPD x 100%						
			Status EKPPD	Nilai yang diperoleh dari hasil evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penilaian atas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah oleh Kemendagri	nilai	Sangat Tinggi (3,35)	Sedang (3,06)	Sangat Tinggi (3,3534)	Sangat Tinggi (3,3536)	Sangat Tinggi (3,3538)
		Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pembangunan	Persentase Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan	Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola <i>input</i> untuk menghasilkan <i>output</i> atau <i>outcomes</i> bagi masyarakat atau pengguna kebijakan	Jumlah Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan dibagi jumlah seluruh kebijakan bidang Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat x 100%	persen	100	100	100	100	100
			Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan	Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola <i>input</i> untuk menghasilkan <i>output</i> atau <i>outcomes</i> bagi masyarakat atau pengguna kebijakan	Jumlah Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan dibagi jumlah seluruh kebijakan bidang Administrasi Pembangunan dan Umum	persen	100	100	100	100	100
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indikator yang mengukur tingkat kepuasan masyarakat penerima layanan terhadap kualitas pelayanan.	Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun bersangkutan	indeks	Baik (84,14)	Baik (84,50)	Baik (85,00) (target 2026)	Baik (85,00) (target 2026)	Baik (85,00)

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	DATA AWAL		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN		
							2021	2022	2024	2025	2026
				Penilaian dilakukan dengan melakukan survei eksternal kepada masyarakat penerima layanan							
			Persentase OPD yang telah mempunyai inovasi pelayanan publik terintegrasi	Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat/ pengguna layanan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Inovasi ini tidak harus berupa suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup pendekatan baru, perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.	Jumlah OPD yang telah mempunyai inovasi pelayanan publik terintegrasi dibagi jumlah OPD x 100% (penghitungan akumulasi didasarkan pada: 1. Inovasi Perangkat Daerah yang ditujukan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik (sesuai obyek yang dilayani) sehingga lebih efektif dan efisien 2. Inovasi Perangkat Daerah yang mampu menggambarkan kolaborasi peran dengan Perangkat Daerah/Instansi lain dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik)	persen	NA	NA	25	35	50
		Meningkatnya sistem penyelenggara an pelayanan publik	Persentase OPD yang telah melakukan tindak lanjut atas hasil SKM	Hasil analisa Survey Kepuasan Masyarakat perlu dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dapat dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling buruk hasilnya. Penentuan perbaikan harus direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan).	Jumlah OPD yang telah melakukan tindak lanjut atas hasil SKM pada tahun bersangkutan / Jumlah OPD x 100%	persen	13,79	100,00	100,00	100,00	100,00
			Persentase peningkatan inovasi pelayanan publik	Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat/ pengguna layanan, baik secara langsung maupun tidak langsung.	Jumlah inovasi tahun n – tahun n – 1 dibagi inovasi tahun n – 1 x 100%	persen	NA	NA	25	25	25

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	DATA AWAL		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN		
							2021	2022	2024	2025	2026
				Inovasi ini tidak harus berupa suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup pendekatan baru, perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.							
			Nilai rata - rata SKM Setda	Nilai rata-rata hasil Survey Kepuasan Masyarakat atau IKM terhadap kualitas layanan Sekretariat Daerah yang terdiri dari 4 (empat) jenis layanan yakni layanan surat menyurat dan arsip, layanan sarana dan prasarana, layanan kerumahtanggaan dan layanan keprotokolan	(Nilai SKM layanan surat menyurat dan arsip + Nilai SKM layanan sarana dan prasarana + Nilai SKM layanan kerumahtanggaan + Nilai SKM layanan keprotokolan) / 4	indeks		Sangat Baik (91,69)	Baik (88)	Sangat Baik (89)	Sangat Baik (90)
4	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Indikator yang mengukur tingkat kualitas implementasi manajemen kinerja organisasi guna mewujudkan budaya akuntabilitas kinerja organisasi yang baik dan dapat mampu mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran APBD	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat	Nilai	A (84,70)	A (85,29)	A (88,00)	A (89,00)	A (90,00)

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip: menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak-belakang, didasarkan pada capaian kinerja pembangunan, layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal Pemerintah Daerah, dan terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi.

Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal beberapa sasaran bersifat *inherent* dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah di rumuskan pada tahap perumusan masalah. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Arah kebijakan yang telah disusun akan menjadi pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Rumusan strategi dan arah kebijakan Sekretariat Daerah Kota Blitar sebagaimana tersebut pada Tabel 5.1 berikut ini:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI: Terwujudnya KOTA BLITAR KEREN, UNGGUL, MAKMUR DAN BERMARTABAT			
MISI: 1. Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender dan Berkepribadian dalam Kebudayaan			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Peningkatan efektifitas perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah	Peningkatan Fasilitasi dan koordinasi penyusunan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan

MISI: 5. Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Terwujudnya internalisasi kinerja organisasi	Penguatan kelembagaan berbasis kinerja	Penguatan pendampingan dan pembinaan OPD dalam Implementasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pembangunan	Peningkatan efektifitas perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah	Penyusunan Peta Kebijakan Daerah
			Peningkatan Fasilitasi dan koordinasi pengendalian kebijakan daerah bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
			Fasilitasi pemenuhan kualitas produk hukum daerah
			Peningkatan Fasilitasi dan koordinasi pengendalian kebijakan daerah bidang perekonomian dan pembangunan
			Peningkatan kapasitas BUMD dan BLUD
			Peningkatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik	Peningkatan sistem penyelenggaraan pelayanan publik	Penguatan pembinaan OPD penyelenggara Pelayanan Publik
Meningkatnya tata kelola perangkat daerah	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Peningkatan implementasi akuntabilitas kinerja pada perangkat daerah	Penyempurnaan penyusunan dan penerapan dokumen akuntabilitas kinerja perangkat daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Guna mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya maka perlu diimplementasikan ke dalam program, kegiatan maupun sub kegiatan. Nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15-5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Adapun rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan Sekretariat Daerah Kota Blitar secara rinci dapat dilihat pada tabel – tabel berikut ini:

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kota Blitar
Tahun 2022

[illegible]

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										K	Rp	K	Rp		
					Tujuan 1: Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) pada tahun bersangkutan	Indeks	80	83,6		85,15		Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	
					Sasaran: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang diimplementasikan	Jumlah kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang diimplementasikan dibagi jumlah seluruh kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan x 100 %	%	100	100		100		Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang ditindaklanjuti	Jumlah rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang ditindaklanjuti / jumlah seluruh rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan x 100%	%	100	100	10.916.041.467	100	10.439.847.370	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	
4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang ditindaklanjuti	Jumlah rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang ditindaklanjuti pada tahun n	Rumusan Kebijakan	6	6	10.916.041.467	6	10.439.847.370	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Draf rumusan kebijakan bidang keagamaan	Jumlah Draf rumusan kebijakan bidang keagamaan pada tahun n	Draf Rumusan Kebijakan	6	6	10.916.041.467	6	10.439.847.370	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	
						Jumlah event keagamaan yang terfasilitasi	Jumlah event keagamaan yang terfasilitasi pada tahun n	event	10	10		10			
						Jumlah guru ngaji dan guru sekolah minggu yang terfasilitasi	Jumlah guru ngaji dan guru sekolah minggu yang terfasilitasi pada tahun n	Orang	1738	1738		1738			
						Jumlah lembaga keagamaan yang terfasilitasi melalui hibah	Jumlah lembaga keagamaan yang terfasilitasi melalui hibah pada tahun n	Lembaga	0	5		19			
					Tujuan 2: Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	1. Status EKPPD	Penilaian atas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah oleh Kemendagri	Nilai	Sangat Tinggi (3,3527)	Sangat Tinggi (3,3531)		Sedang (3,06)		Bagian Pemerintahan	
					Sasaran 1: Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pembangunan	1. Persentase Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan	Jumlah Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan dibagi jumlah seluruh kebijakan bidang Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat x 100%	%	100	100					

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										K	Rp	K	Rp		
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase rumusan kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	Jumlah rumusan kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti / jumlah seluruh rumusan kebijakan bidang pemerintahan x 100%	%	100	100	3.020.756.550	100	2.944.146.104,60	Bagian Pemerintahan	
						Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang aktif	Jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dilaksanakan pembinaan dibagi dengan jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan kelurahan sesuai Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 x 100%	%	50,00	66,67		66,67			
4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase laporan pelaksanaan tugas Pemerintahan umum yang terfasilitasi	Jumlah laporan pelaksanaan tugas pemerintahan yang terfasilitasi / jumlah laporan pelaksanaan tugas pemerintahan keseluruhan x 100%	%	100	100	2.916.573.250	100	2.840.153.841,60	Bagian Pemerintahan	
						Persentase laporan pelaksanaan tugas kewilayahan yang terfasilitasi	Jumlah laporan pelaksanaan tugas kewilayahan yang terfasilitasi / jumlah laporan pelaksanaan tugas kewilayahan keseluruhan x 100%	%	100	100		100			
						Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dilaksanakan pembinaan	Jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dilaksanakan pembinaan/dengan jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan kelurahan x 100%	%	50	66,67		66,67			
						Persentase laporan pelaksanaan tugas otonomi daerah yang terfasilitasi	Jumlah laporan pelaksanaan tugas otonomi daerah yang terfasilitasi / jumlah laporan pelaksanaan tugas otonomi daerah keseluruhan x 100%	%	100	100		100			
4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah jenis dokumen laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang tersusun	Jumlah jenis dokumen laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang tersusun pada tahun n	Dokumen	3	3	291.685.250	3	290.769.784	Bagian Pemerintahan	
						Jumlah jenis koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	Jumlah jenis koordinasi penyelenggaraan pemerintahan pada tahun n	Koordinasi	3	3		3			

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										K	Rp	K	Rp		
						Jumlah peserta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)	Jumlah peserta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) pada tahun n	Orang	0	500		500			
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah jenis fasilitas penyelenggaraan administrasi kewilayahan	Jumlah jenis fasilitas penyelenggaraan administrasi kewilayahan pada tahun n	Fasilitasi	N/A	3	2.439.604.450	3	2.365.231.957,60	Bagian Pemerintahan	
						Jumlah peserta rakor kewilayahan	Jumlah peserta rakor kewilayahan pada tahun n	Orang	N/A	500		500			
						Jumlah jenis lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dilaksanakan pembinaan	Jumlah jenis lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dilaksanakan pembinaan kelapembi tahun kelurahan yang n	Lembaga Kemasyar katan	3	4		4			
						Jumlah jenis laporan fasilitas pemberdayaan masyarakat pada pemanfaatan TTG	Jumlah jenis laporan fasilitas pemberdayaan masyarakat pada pemanfaatan TTG pada pemanfaatan pemberdayaan masyarakat pada n	Jenis Laporan	2	2		2			
						Jumlah jenis laporan penyelenggaraan fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah jenis laporan penyelenggaraan fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat penyaMasyar rahuan fasilitas Bulan Bhakti Gotong n	Jenis Laporan	2	2		2			
4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah jenis dokumen pelaporan pertanggungjawaban yang disusun	Jumlah jenis dokumen pelaporan pertanggungjawaban yang disusun pada tahun n	jenis dokumen	1	1	185.283.550	1	184.152.100	Bagian Pemerintahan	
						Jumlah jenis koordinasi peningkatan kualitas otonomi daerah	Jumlah jenis koordinasi peningkatan kualitas otonomi daerah pada tahun n	jenis koordinasi	3	3		3			
4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti	Jumlah kerjasama dengan Pemerintah Daerah/Lembaga/ Instansi lain yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah rencana kerjasama dengan Pemerintah Daerah/Lembaga/ Instansi lain pada tahun n x 100%	%	83,33%	83,33%	104.183.300	83,33	103.992.263	Bagian Pemerintahan	
4	01	02	2.04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah event asosiasi Pemerintah Kota yang diikuti	Jumlah event asosiasi Pemerintah Kota yang diikuti pada tahun n	event	2	2	104.183.300	2	103.992.263	Bagian Pemerintahan	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										K	Rp	K	Rp		
						Jumlah kerjasama yang dilaksanakan dengan Pemerintah Daerah/Lembaga/Instansi lain	Jumlah kerjasama yang dilaksanakan dengan Pemerintah Daerah/Lembaga/ Instansi lain pada tahun n	kerjasama	6	6		6			
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase produk hukum yang tidak dibatalkan baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi	Jumlah produk hukum yang tidak dibatalkan baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi / jumlah seluruh produk hukum pada tahun n x 100%	%	100	100	1.094.450.200	112,86	976.678.111	Bagian Hukum	
4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang terlaksana	Jumlah fasilitasi dan koordinasi hukum yang terlaksana / fasilitasi dan koordinasi hukum yang direncanakan x 100%	%	100%	100	1.094.450.200	131,23	976.678.111	Bagian Hukum	
4	01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Keputusan Walikota Yang Telah Dilakukan Harmonisasi dan Sinkronisasi	Jumlah Keputusan Walikota Yang Telah Dilakukan Harmonisasi dan Sinkronisasi pada tahun n	SK	250	250	407.317.900	318	378.838.231	Bagian Hukum	
						Jumlah Peraturan Walikota Yang Telah Dilakukan Harmonisasi dan Sinkronisasi	Jumlah Peraturan Walikota Yang Telah Dilakukan Harmonisasi dan Sinkronisasi pada tahun n	Perwali	60	60		94	-		
						Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Yang Telah Dilakukan Harmonisasi dan Sinkronisasi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang telah dilakukan Harmonisasi dan Sinkronisasi pada tahun n	Ranperda	10	10		7	-		
4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	jumlah permasalahan hukum yang tertangani	jumlah permasalahan hukum yang tertangani pada tahun n	Permasalahan Hukum	4	4	431.233.400	4	348.248.320	Bagian Hukum	
						jumlah peserta penyuluhan hukum	jumlah peserta penyuluhan hukum pada tahun n	Orang	250	200		200	-		
4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	jumlah peserta sosialisasi produk hukum daerah	jumlah peserta sosialisasi produk hukum daerah pada tahun n	Orang	250	250	255.898.900	250	249.591.560	Bagian Hukum	
						Jumlah produk hukum yang terdokumentasi dan terpublikasi	Jumlah produk hukum yang terdokumentasi dan terpublikasi pada tahun n	Produk Hukum	70	70		91	-		
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang ditindaklanjuti	Jumlah rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang ditindaklanjuti / jumlah seluruh rumusan kebijakan	%	100	100	789.531.000	100	523.855.464	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											K	Rp	K	Rp	
							kesejahteraan rakyat bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat x 100%								
4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang ditindaklanjuti	Jumlah rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang ditindaklanjuti pada tahun n	Rumusan kebijakan	6	4	789.531.000	4	523.855.464	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	
4	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah draf rumusan kebijakan bidang kesejahteraan sosial	Jumlah draf rumusan kebijakan bidang kesejahteraan sosial pada tahun n	Draf Rumusan Kebijakan	3	2	683.542.100	2	423.136.423	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	
4	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah draf rumusan kebijakan bidang kesejahteraan masyarakat	Jumlah draf rumusan kebijakan bidang kesejahteraan masyarakat pada tahun n	Draf Rumusan Kebijakan	2	2	105.988.900	2	100.719.041	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase rumusan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	Jumlah rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang perekonomian yang ditindaklanjuti / jumlah seluruh rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang perekonomian x 100%	%	100	100	505.065.100	100	438.739.940	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	
4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah rumusan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	Jumlah rumusan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti pada tahun n	Rumusan kebijakan	10	6	490.662.350	6	424.570.940	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	
					Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Rata-Rata Pencapaian Kinerja DBHCHT	Jumlah persentase pencapaian kinerja DBHCHT seluruh OPD yang mampu / jumlah OPD yang mampu x 100%	%	80%	80		0	-		
4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah draf rumusan kebijakan bidang pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah draf rumusan kebijakan bidang pengelolaan BUMD dan BLUD pada tahun n	Draf Rumusan Kebijakan	0	2	205.360.300	2	185.845.400	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Operasi bersama pemberantasan Cukai Ilegal	Jumlah Operasi bersama pemberantasan Cukai Ilegal pada tahun n	Kegiatan	5	5	5.933.850	0	5.926.000	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	
4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah draf rumusan kebijakan bidang perekonomian	Jumlah draf rumusan kebijakan bidang	Draf Rumusan Kebijakan	4	4	279.368.200	4	232.799.540	Bagian Perekonomian dan	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										K	Rp	K	Rp		
							perekonomian pada tahun n							Kesejahteraan Rakyat	
4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Rata-Rata Pencapaian Kinerja DBHCHT	Jumlah persentase pencapaian kinerja DBHCHT seluruh OPD yang mengampu / jumlah OPD yang mengampu x 100%	%	80	80	14.402.750	0	14.169.000	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	
4	01	03	2.04	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah pelaporan DBHCHT tepat waktu	Jumlah pelaporan DBHCHT tepat waktu pada tahun n (laporan semester 1 dan laporan semester 2)	Dokumen	2	2	14.402.750	2	14.169.000	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	
						2. Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan	Jumlah Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan/ Jumlah Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum x 100%	%	100	100		100		Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase rumusan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	Jumlah rumusan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti / jumlah seluruh rumusan kebijakan bidang pembangunan x 100%	%	100	100	1.454.705.824	100	1.297.204.931	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	
						Persentase pengadaan barang dan jasa melalui E-Procurement	Jumlah pengadaan barang dan jasa melalui E-Procurement / jumlah seluruh pengadaan barang dan jasa x 100%	%	15,62	35,00		31,94	-		
4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah bahan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	Jumlah bahan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti pada tahun n	bahan kebijakan	15	10	284.914.724	10	250.051.635	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	
4	01	03	2.02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah draft rumusan kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan permukiman, lingkungan hidup, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, perhubungan, kehutanan dan urusan penunjang keuangan, perencanaan, penelitian dan pengembangan	Jumlah draft rumusan kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan permukiman, lingkungan hidup, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, perhubungan, kehutanan dan urusan penunjang keuangan, perencanaan, penelitian dan pengembangan pada tahun n	Draf Rumusan Kebijakan	6	6	87.767.500	6	73.594.631	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										K	Rp	K	Rp		
4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah laporan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah laporan evaluasi pembangunan daerah pada tahun n	Dokumen	4	12	197.147.224	12	176.457.004	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	
						Jumlah draf rumusan kebijakan pengendalian dan evaluasi Program Pembangunan	Jumlah draf rumusan kebijakan pengendalian dan evaluasi Program Pembangunan pada tahun n	Draf Rumusan Kebijakan	0	4		4	-		
4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	SKM Layanan UKPBJ	Hasil Nilai SKMLayanan UKPBJ yang dilaksanakan pada tahun n	Nilai	0	BAIK (81,50)	1.169.791.100	BAIK (82,84)	1.047.153.296	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	
						Jumlah Variabel kematangan UKPBJ yang telah mencapai Level 3 (Proaktif)	Jumlah Variabel kematangan UKPBJ yang telah mencapai Level 3 (Proaktif) pada tahun n	Nilai	2/9	4/9		4/9			
4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Pengadaan Barang/Jasa yang di fasilitasi	Jumlah Pengadaan Barang/Jasa yang di fasilitasi pada tahun n	Paket		80	755.058.550	73	679.578.391	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah pembinaan Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Penyedia) berdasarkan Jenis Pengadaan	Jumlah pembinaan Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Penyedia) berdasarkan Jenis Pengadaan pada tahun n	Jenis	0	2	92.458.600	2	79.887.400	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	
4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Jenis Pembinaan Pelaku Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan	Jumlah Jenis Pembinaan Pelaku Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan pada tahun n	Jenis		4	322.273.950	4	287.687.505	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	
					Tujuan 2: Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	2. Nilai SAKIP	Penilaian atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh KemenPAN RB	Nilai	BB (72,06)	BB (72,15)		BB (73,73)			
					Sasaran 2: Terwujudnya internalisasi kinerja organisasi	Persentase OPD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi (penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik)	Jumlah OPD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi (penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik) dibagi jumlah seluruh OPD x 100%	%	34,48	55,17		76,67			
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase OPD yang telah menjalankan 8 area perubahan reformasi birokrasi	Jumlah OPD yang telah menjalankan 8 area perubahan reformasi birokrasi sesuai standar / jumlah seluruh OPD x 100%	%	34,48	55,17	653.447.660	76,67	649.764.276	Bagian Organisasi	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										K	Rp	K	Rp		
4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	Jumlah OPD yang menerapkan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi	Jumlah OPD yang menerapkan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi pada tahun n	OPD	14	20	653.447.660	23	649.764.276	Bagian Organisasi	
4	01	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah jabatan yang memenuhi standar jabatan (Anjab, ABK, SKJ dan Evaluasi Jabatan)	Jumlah jabatan yang memenuhi standar jabatan (Anjab, ABK, SKJ dan Evaluasi Jabatan) pada tahun n	Jabatan	1400	1700	238.053.200	1700	236.827.490	Bagian Organisasi	
						Jumlah Kebijakan penyalarsan tugas pokok fungsi SKPD/Unit Kerja	Jumlah Kebijakan penyalarsan tugas pokok fungsi SKPD/Unit Kerja pada tahun n	Kebijakan	2	2		2	-		
4	01	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah jenis Dokumen Penerapan Kinerja Pemda yang disusun	Jumlah jenis Dokumen Penerapan Kinerja Pemda yang disusun pada tahun n	Dokumen	2	2	415.394.460	2	412.936.786	Bagian Organisasi	
						Jumlah OPD sampling evaluasi SAKIP tingkat KemenPAN RB	Jumlah OPD sampling evaluasi SAKIP tingkat KemenPAN RB pada tahun n	OPD	19	23		30	-		
						Jumlah OPD yang telah menyusun rencana kerja reformasi birokrasi sesuai ketentuan	Jumlah OPD yang telah menyusun rencana kerja reformasi birokrasi sesuai ketentuan pada tahun n	OPD	14	21		28	-		
						Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan Budaya Kerja	Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan Budaya Kerja pada tahun n	OPD	4	6		13	-		
					Tujuan 3: Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun bersangkutan	Nilai	BAIK (82,39)	BAIK (83,00)		Baik (84,50)		Bagian Organisasi dan Bagian Umum	
					Sasaran: Meningkatnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik	1. Persentase OPD yang telah melakukan tindak lanjut atas hasil SKM	Jumlah OPD yang telah melakukan tindak lanjut atas hasil SKM pada tahun bersangkutan / Jumlah OPD x 100%	%	10,34	20,69		100,00		Bagian Organisasi	
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase OPD yang memiliki IKM dengan kategori Sangat Baik	Jumlah OPD yang memiliki nilai IKM dengan kategori Sangat Baik / jumlah seluruh OPD x 100%	%	10,34	20,69	399.733.650	24,14	395.325.122	Bagian Organisasi	
4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	Jumlah OPD yang menerapkan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi	Jumlah OPD yang menerapkan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi pada tahun n	OPD	14	20	399.733.650	23	395.325.122	Bagian Organisasi	
4	01	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah OPD yang hasil survey IKM nya berpredikat sangat baik	Jumlah OPD yang hasil survey IKM nya berpredikat sangat baik pada tahun n	OPD	2	6	399.733.650	7	395.325.122	Bagian Organisasi	
						Jumlah OPD yang telah melakukan review SOP	Jumlah OPD yang telah melakukan review SOP pada tahun n	OPD	29	29		30	-		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										K	Rp	K	Rp		
						Jumlah OPD yang telah melakukan review Standar Pelayanan sesuai dengan peraturan	Jumlah OPD yang telah melakukan review Standar Pelayanan sesuai dengan peraturan pada tahun n	OPD	24	26		26	-		
						Jumlah OPD yang telah menyusun proses bisnis	Jumlah OPD yang telah menyusun proses bisnis pada tahun n	OPD	10	20		30	-		
						Jumlah OPD calon peserta kompetisi inovasi pelayanan publik	Jumlah OPD calon peserta kompetisi inovasi pelayanan publik pada tahun n	OPD	4	4		4	-		
						Jumlah OPD yang dievaluasi penyelenggaraan pelayanan publik	Jumlah OPD yang dievaluasi penyelenggaraan pelayanan publik pada tahun n	OPD	3	6		9	-		
						2. Nilai rata-rata SKM Setda	(Nilai SKM layanan surat menyurat dan arsip + Nilai SKM layanan sarana dan prasarana + Nilai SKM layanan kerumah tanggaan + Nilai SKM layanan keprotokolan) / 4	Nilai		BAIK (86,00)		SANGAT BAIK (91,69)		Bagian Umum	
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Fasilitas Layanan Kedinasan KDH/WKDH/ Sekretariat Daerah sesuai standar/ ketentuan yang berlaku	Jumlah Fasilitas Layanan Kedinasan KDH/WKDH/ Sekretariat Daerah sesuai standar/ketentuan yang berlaku dibagi jumlah seluruh Fasilitas Layanan Kedinasan KDH/WKDH/ Sekretariat Daerah pada tahun n x 100%	%	100	100	13.967.671.060	100	13.396.047.118	Bagian Umum	
4	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD pada PD yang dikelola sesuai standar	Jumlah BMD pada PD yang dikelola sesuai standar / jumlah seluruh BMD yang ada pada PD x 100%	%	100	100	6.576.000	100	6.576.000	Bagian Umum	
4	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada tahun n	Dokumen	2	2	6.576.000	2	6.576.000	Bagian Umum	
4	01	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pendapatan Daerah	Jumlah Pendapatan Daerah yang diterima pada tahun n / jumlah target Pendapatan Daerah yang ditetapkan pada tahun n x 100%	%	100	100	1.644.000	100	1.644.000	Bagian Umum	
4	01	01	2.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah pada tahun n	Dokumen	1	1	1.644.000	1	1.644.000	Bagian Umum	
4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan / rencana jumlah Pengadaan	%	100	100	157.073.500	2	154.290.900	Bagian Umum	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										K	Rp	K	Rp		
							Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pada tahun n x 100%								
4	01	01	2.07		Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis Pengadaan Mebel pada tahun n	Jenis	1	1	84.000.000	1	82.390.000	Bagian Umum	
4	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya pada tahun n	Unit	0	0	73.073.500	5	71.900.900	Bagian Umum	
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar pada tahun n	%	100	100	3.958.836.124	100	3.837.971.197	Bagian Umum	
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis Jasa Surat Menyurat yang tersedia	Jumlah jenis Jasa Surat Menyurat yang tersedia pada tahun n	Jenis	1	1	600.000	1	600.000	Bagian Umum	
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan	Jumlah rekening yang terbayarkan pada tahun n	Rekening	4	4	1.010.221.787	4	937.738.287	Bagian Umum	
4	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	Jumlah jenis Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia pada tahun n	Jenis	6	6	81.714.900	2	48.051.100	Bagian Umum	
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelayanan perkantoran yang tersedia	Jumlah tenaga pelayanan perkantoran yang tersedia pada tahun n	Orang	60	60	2.866.299.437	87	2.851.581.810,28	Bagian Umum	
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai standar	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai standar pada tahun n	%	100	100	1.605.426.000	88,35	1.573.025.199	Bagian Umum	
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pajak kendaraan Jabatan yang terbayarkan pajaknya	Jumlah Pajak kendaraan Jabatan yang terbayarkan pajaknya pada tahun n	Unit	2	2	10.000.000	1	6.705.100,00	Bagian Umum	
4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara pada tahun n	Unit	21	21	347.325.200	29	334.406.100	Bagian Umum	
						Jumlah Pajak kendaraan dinas Operasional yang terbayarkan pajaknya	Jumlah Pajak kendaraan dinas Operasional yang terbayarkan pajaknya pada tahun n	Unit	65	65		47			
4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara pada tahun n	Unit	2	2	956.910.000	2	946.018.499	Bagian Umum	
						Jumlah rumah dinas yang terpelihara	Jumlah rumah dinas yang terpelihara pada tahun n	Unit	2	2		2			
4	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara (termasuk AC,	Jenis	12	12	291.190.800	10	285.895.500	Bagian Umum	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										K	Rp	K	Rp		
					Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	(termasuk AC, Exhaust fan, kipas angin yang menempel di dinding, mebelair)	Exhaust fan, kipas angin yang menempel di dinding, mebelair) pada tahun n								
4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah / jumlah Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang seharusnya ada x 100%	%	100	100	930.262.414	100	920.076.730	Bagian Umum	
4	01	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada tahun n	Dokumen	12	12	178.952.314	12	171.824.430	Bagian Umum	
4	01	01	2.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Jenis Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Jenis Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada tahun n	Jenis	23	23	145.310.100	23	145.297.300	Bagian Umum	
4	01	01	2.11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terfasilitasi	Jumlah Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terfasilitasi pada tahun n	Fasilitasi	2	2	6.000.000	2	2.955.000	Bagian Umum	
4	01	01	2.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Jenis Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Jenis Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada tahun n	Jenis	2	2	600.000.000	2	600.000.000	Bagian Umum	
4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang di laksanakan	Jumlah fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang di laksanakan / jumlah seluruh fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang seharusnya ada x 100%	%	100	100	4.952.167.850	100	4.747.291.008	Bagian Umum	
4	01	01	2.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Tugas/Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang terfasilitasi	Jumlah Penyelenggaraan Tugas/Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang terfasilitasi pada tahun n	Fasilitasi	23	4	2.041.753.700	3	1.935.876.513	Bagian Umum	
4	01	01	2.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Tugas/Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Tugas/Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Fasilitasi	23	4	2.354.230.850	3	2.255.525.915	Bagian Umum	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										K	Rp	K	Rp		
						Kepala Daerah yang terfasilitasi	Daerah yang terfasilitasi pada tahun n								
4	01	01	2.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang terfasilitasi	Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang terfasilitasi pada tahun n	Fasilitasi	12	12	556.183.300	10	555.888.580	Bagian Umum	
4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Fasilitasi Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan sesuai dengan SOP	Jumlah Fasilitasi Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan sesuai dengan SOP / jumlah Fasilitasi Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan pada tahun n x 100%	%	80	80	2.307.685.372	80	2.108.720.084	Bagian Umum	
4	01	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah fasilitas upacara sesuai standar keprotokolan	Jumlah fasilitas upacara sesuai standar keprotokolan pada tahun n	Upacara	9	9	1.907.348.780	9	1.764.675.154	Bagian Umum	
						Jumlah penerimaan tamu daerah sesuai standar keprotokolan	Jumlah penerimaan tamu daerah sesuai standar keprotokolan pada tahun n	penerimaan	24	24		52			
4	01	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Naskah Sambutan Pimpinan Daerah Yang disusun	Jumlah Naskah Sambutan Pimpinan Daerah Yang disusun pada tahun n	Naskah	400	400	209.668.800	609	154.076.630	Bagian Umum	
4	01	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Dokumentasi kegiatan Pimpinan dan Pemerintah Daerah: Baliho	Jumlah Dokumentasi kegiatan Pimpinan dan Pemerintah Daerah: Baliho pada tahun n	Unit	25	25	190.667.792	9	189.968.300	Bagian Umum	
						Jumlah Dokumentasi kegiatan Pimpinan dan Pemerintah Daerah: Foto	Jumlah Dokumentasi kegiatan Pimpinan dan Pemerintah Daerah: Foto pada tahun n	Unit	3000	3000		6051			
						Jumlah Dokumentasi kegiatan Pimpinan dan Pemerintah Daerah: Spanduk	Jumlah Dokumentasi kegiatan Pimpinan dan Pemerintah Daerah: Spanduk pada tahun n	Unit	30	30		42			
4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun tepat waktu dan sesuai standar / jumlah seluruh dokumen perencanaan dan pelaporan yang seharusnya ada x 100%	%	100	100	47.999.800	100	46.452.000	Bagian Umum	
4	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen ketatalaksanaan yang tersusun	Jumlah jenis dokumen ketatalaksanaan yang tersusun pada tahun n	Dokumen	1	1	47.999.800	1	46.452.000	Bagian Umum	
					Tujuan 4: Meningkatkan Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Penilaian atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah oleh	Nilai	A (83,99)	A (86)		A (85,29)		Bagian Organisasi dan Bagian Umum	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										K	Rp	K	Rp		
							Inspektorat Daerah pada tahun bersangkutan								
					Sasaran: Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Penilaian atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah pada tahun bersangkutan	Nilai	A (83,99)	A (86)		A (85,29)		Bagian Organisasi dan Bagian Umum	
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil Nilai SKM layanan internal Setda yang dilaksanakan pada tahun n			BAIK (86,00)	145.748.500	91,69	141.442.100	Bagian Organisasi dan Bagian Umum	
4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan tersusun tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun tepat waktu / jumlah seluruh dokumen perencanaan dan pelaporan yang seharusnya ada x 100%	%	100	100	68.787.600	100	68.009.000	Bagian Organisasi	
4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun (Renstra, PK, Renaksi, SPP, SOP, Renja, RKA, DPA, PRKA, DPPA)	Jumlah jenis dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun (Renstra, PK, Renaksi, SPP, SOP, Renja, RKA, DPA, PRKA, DPPA) pada tahun n	Dokumen	7	10	40.462.600	10	40.065.000	Bagian Organisasi	
4	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen pelaporan perangkat daerah yang tersusun (LKjIP, LKPJ, LPPD, Evaluasi RKPD, Pengukuran Kinerja Tribunal, Renaksi dan Monev Renaksi)	Jumlah jenis dokumen pelaporan perangkat daerah yang tersusun (LKjIP, LKPJ, LPPD, Evaluasi RKPD, Pengukuran Kinerja Tribunal, Renaksi dan Monev Renaksi) pada tahun n	Dokumen	2	7	28.325.000	7	27.944.000	Bagian Organisasi	
4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur perangkat daerah yang memperoleh layanan kepegawaian	Jumlah aparatur perangkat daerah yang memperoleh layanan kepegawaian / jumlah seluruh aparatur perangkat daerah x 100%	%	100	100	76.960.900	100	73.433.100	Bagian Organisasi	
4	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti	Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti pada tahun n	event	5	5	76.960.900	5	73.433.100	Bagian Organisasi	
						Jumlah pegawai yang mendapatkan fasilitasi pembinaan kepegawaian	Jumlah pegawai yang mendapatkan fasilitasi pembinaan kepegawaian tahun n	Orang	0	84		84			
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum	Jumlah ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai	%	100	100	1.931.014.850	100	1.880.429.323	Bagian Umum	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											K	Rp	K	Rp	
						perangkat daerah sesuai standar	standar / jumlah seluruh ketersediaan administrasi umum perangkat daerah x 100%								
4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	Jumlah jenis komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia pada tahun n	Jenis	25	25	79.531.400	24	75.741.900	Bagian Umum	
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi pada tahun n	Jenis	2	3	325.046.700	3	303.537.300	Bagian Umum	
						Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi pada tahun n	Jenis	0	5		0			
4	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia pada tahun n	Jenis	23	23	31.791.400	22	31.669.400	Bagian Umum	
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dos /kotak/porsi makanan dan minuman yang tersedia	Jumlah dos /kotak/porsi makanan dan minuman yang tersedia pada tahun n	Dos	0	2950	619.687.400	4549	603.101.400	Bagian Umum	
						Jumlah porsi makanan dan minuman yang tersedia	Jumlah porsi makanan dan minuman yang tersedia pada tahun n	Porsi	0	2188		2187			
						Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia pada tahun n	Jenis	45	51		51			
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia	Jumlah barang cetakan yang tersedia pada tahun n	Jenis	16	16	77.651.900	15	77.651.900	Bagian Umum	
						Jumlah lembar penggandaan	Jumlah lembar penggandaan pada tahun n	Lembar	50000	50000		50000	-		
4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	Jumlah bahan bacaan yang tersedia pada tahun n	Jenis	2	2	47.400.000	2	47.400.000	Bagian Umum	
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah dos/kotak mamin yang tersedia	Jumlah dos/kotak mamin yang tersedia pada tahun n	Dos	2165	0	749.906.050	0	741.327.423	Bagian Umum	
						Jumlah porsi mamin yang tersedia	Jumlah porsi mamin yang tersedia pada tahun n	Porsi	3109	0		0	-		
						Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti pada tahun n	Rakor	130	130		119	-		
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Jumlah pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar / jumlah seluruh pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah x 100%	%	100	100	11.034.432.970	100	10.833.787.345	Bagian Umum	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										K	Rp	K	Rp		
4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pada tahun n	Laporan	12	12	11.023.497.070	12	10.822.851.445	Bagian Umum	
4	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah jenis Laporan Keuangan yang tersusun (Bulanan/Semesteran)	Jumlah jenis Laporan Keuangan yang tersusun (Bulanan/Semesteran) pada tahun n	Dokumen	4	4	10.935.900	4	10.935.900	Bagian Umum	

Tabel 6.2
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kota Blitar
Tahun 2023

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN/DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
									2023			
									K	Rp		
1					2	3	4	5	6	7	8	9
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							
					Tujuan 2: Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	1. Status EKPPD	Penilaian atas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah oleh Kemendagri	Nilai	Sangat Tinggi (3,3532)		Bagian Pemerintahan	Kota Blitar
					Sasaran 1: Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pembangunan	1. Persentase Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan	Jumlah Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan dibagi jumlah seluruh kebijakan bidang Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat x 100%	%	100%		Bagian Pemerintahan	
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase kelurahan tertib administrasi	Jumlah kelurahan swasembada dibagi jumlah kelurahan se Kota Blitar x 100%	%	57,14	104.598.428	Bagian Pemerintahan	
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah kelurahan yang berkategori cepat berkembang	Jumlah kelurahan yang berkategori cepat berkembang pada tahun n	Kelurahan	18	104.598.428	Bagian Pemerintahan	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN/DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
									2023			
									K	Rp		
2	13	04	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan pada tahun bersangkutan	Dokumen	21	104.598.428	Bagian Pemerintahan	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							
4	01				SEKRETARIAT DAERAH							
					Tujuan 1: Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) pada tahun bersangkutan	Indeks	84,89		Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Kota Blitar
					Sasaran: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang diimplementasikan	Jumlah kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang diimplementasikan dibagi jumlah seluruh kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan x 100 %	%	100		Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang ditindaklanjuti	Jumlah rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang ditindaklanjuti / jumlah seluruh rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan x 100%	%	100	9.972.553.403	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	
4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang ditindaklanjuti	Jumlah rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang ditindaklanjuti pada tahun n	Rumusan Kebijakan	6	9.972.553.403	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual pada tahun bersangkutan	Dokumen	25	9.972.553.403	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	
					Tujuan 2: Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	1. Status EKPPD	Penilaian atas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah oleh Kemendagri	Nilai	Sangat Tinggi (3,3532)		Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum, Bagian Perekonomian dan Kesra	Kota Blitar

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN/DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
									2023			
									K	Rp		
					Sasaran 1: Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pembangunan	1.Persentase Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan	Jumlah Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan dibagi jumlah seluruh kebijakan bidang Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat x 100%	%	100		Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum, Bagian Perekonomian dan Kesra	
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase rumusan kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	Jumlah rumusan kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti / jumlah seluruh rumusan kebijakan bidang pemerintahan x 100%	%	100	1.118.296.847	Bagian Pemerintahan	
						Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang aktif	Jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dilaksanakan pembinaan dibagi dengan jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan kelurahan sesuai Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 x 100%	%	83,33			
4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase laporan pelaksanaan tugas Pemerintahan umum yang terfasilitasi	Jumlah laporan pelaksanaan tugas pemerintahan yang terfasilitasi / jumlah laporan pelaksanaan tugas pemerintahan keseluruhan x 100%	%	100	1.013.071.714	Bagian Pemerintahan	
						Persentase laporan pelaksanaan tugas kewilayahan yang terfasilitasi	Jumlah laporan pelaksanaan tugas kewilayahan yang terfasilitasi / jumlah laporan pelaksanaan tugas kewilayahan keseluruhan x 100%	%	100			
						Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dilaksanakan pembinaan	Jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dilaksanakan pembinaan/dengan jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan kelurahan x 100%	%	83			
						Persentase laporan pelaksanaan tugas otonomi daerah yang terfasilitasi	Jumlah laporan pelaksanaan tugas otonomi daerah yang terfasilitasi / jumlah laporan pelaksanaan tugas otonomi daerah keseluruhan x 100%	%	100			

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN/DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
									2023			
									K	Rp		
4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan pada tahun bersangkutan	Dokumen	10	294.602.204	Bagian Pemerintahan	
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan pada tahun bersangkutan	Dokumen	5	718.469.510	Bagian Pemerintahan	
4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah pada tahun bersangkutan	Dokumen	4	-	Bagian Pemerintahan	
4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti	Jumlah kerjasama dengan Pemerintah Daerah/Lembaga/Instansi lain yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah rencana kerjasama dengan Pemerintah Daerah/Lembaga/Instansi lain pada tahun n x 100%	%	83,33	105.225.133	Bagian Pemerintahan	
4	01	02	2.04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri pada tahun bersangkutan	Dokumen	8	105.225.133	Bagian Pemerintahan	
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase produk hukum yang tidak dibatalkan baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi	Jumlah produk hukum yang tidak dibatalkan baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi / jumlah seluruh produk hukum pada tahun n x 100%	%	100	1.125.946.586	Bagian Hukum	
4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang terlaksana	Jumlah fasilitasi dan koordinasi hukum yang terlaksana / fasilitasi dan koordinasi hukum yang direncanakan x 100%	%	100	1.125.946.586	Bagian Hukum	
4	01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun pada tahun bersangkutan	Dokumen	320	411.471.374	Bagian Hukum	
4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum pada tahun bersangkutan	Kasus	4	455.983.185	Bagian Hukum	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN/DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
									2023			
									K	Rp		
4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi pada tahun bersangkutan	Dokumen	70	258.492.027	Bagian Hukum	
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang ditindaklanjuti	Jumlah rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang ditindaklanjuti / jumlah seluruh rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat x 100%	%	100	191.426.310	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	
4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang ditindaklanjuti	Jumlah rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang ditindaklanjuti pada tahun n	Rumusan kebijakan	4	191.426.310	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	
4	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB pada tahun bersangkutan	Dokumen	2	84.377.521	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN/DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
									2023			
									K	Rp		
4	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas pada tahun bersangkutan	Dokumen	2	107.048.789	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase rumusan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	Jumlah rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang perekonomian yang ditindaklanjuti / jumlah seluruh rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang perekonomian x 100%	%	100	1.174.534.353	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	
4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah rumusan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	Jumlah rumusan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti pada tahun n	Rumusan kebijakan	6	1.174.534.353	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	
4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD pada tahun bersangkutan	Dokumen	2	207.414.105	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian pada tahun bersangkutan	Laporan	2	715.015.966	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	
4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil pada tahun bersangkutan	Dokumen	4	252.104.282	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	
4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen pemantauan kebijakan sumber daya alam yang ditindaklanjuti	Jumlah dokumen pemantauan kebijakan sumber daya alam yang ditindaklanjuti pada tahun n	Dokumen	2	2.307.611.034		

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN/DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
									2023			
									K	Rp		
4	01	03	2.04	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja pada tahun bersangkutan	Dokumen	2	2.307.611.034	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	
						2. Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan	Jumlah Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan/ Jumlah Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum x 100%	%	100		Bagian Layanan Pengadaan Barang/ Jasa	
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase rumusan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	Jumlah rumusan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti / jumlah seluruh rumusan kebijakan bidang pembangunan x 100%	%	100	1.204.138.413	Bagian Layanan Pengadaan Barang/ Jasa	
						Persentase pengadaan barang dan jasa melalui <i>E-Procurement</i>	Jumlah pengadaan barang dan jasa melalui E-Procurement / jumlah seluruh pengadaan barang dan jasa x 100%	%	50,00			
4	01	03	2.0		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah bahan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	Jumlah bahan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti pada tahun n	bahan kebijakan	10	349.540.780	Bagian Layanan Pengadaan Barang/ Jasa	
4	01	03	2.02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah pada tahun bersangkutan	Dokumen	6	72.703.466	Bagian Layanan Pengadaan Barang/ Jasa	
4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan pada tahun bersangkutan	Laporan	16	276.837.314	Bagian Layanan Pengadaan Barang/ Jasa	
4	01	03	2.0		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	SKM Layanan UKPBJ	Hasil Nilai SKMLayanan UKPBJ yang dilaksanakan pada tahun n	Nilai	BAIK (82)	854.597.633	Bagian Layanan Pengadaan Barang/ Jasa	
						Jumlah Variabel kematangan UKPBJ yang telah mencapai Level 3 (Proaktif)	Jumlah Variabel kematangan UKPBJ yang telah mencapai Level 3 (Proaktif) pada tahun n	Nilai	5/9			

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN/DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
									2023			
									K	Rp		
4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa pada tahun bersangkutan	Dokumen	80	476.496.841	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada tahun bersangkutan	Dokumen	2	52.602.739	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	
4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa pada tahun bersangkutan	Orang	300	325.498.053	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	
					Tujuan 2: Meningkatnya kinerja akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	2. Nilai SAKIP	Penilaian atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh KemenPAN RB	Nilai	BB (73,74)		Bagian Organisasi	Kota Blitar
					Sasaran 2: Terwujudnya internalisasi kinerja organisasi	Persentase OPD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi (penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik)	Jumlah OPD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi (penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik) dibagi jumlah seluruh OPD x 100%	%	65,52		Bagian Organisasi	
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase OPD yang telah menjalankan 8 area perubahan reformasi birokrasi	Jumlah OPD yang telah menjalankan 8 area perubahan reformasi birokrasi sesuai standar / jumlah seluruh OPD x 100%	%	65,52	629.512.038	Bagian Organisasi	
4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	Jumlah OPD yang menerapkan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi	Jumlah OPD yang menerapkan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi pada tahun n	OPD	22	629.512.038	Bagian Organisasi	
4	01	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada tahun bersangkutan	Dokumen	6	258.907.137	Bagian Organisasi	
4	01	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada tahun bersangkutan	Dokumen	3	355.604.901	Bagian Organisasi	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN/DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
									2023			
									K	Rp		
4	01	01	2.13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah pada tahun bersangkutan	Dokumen	2	15.000.000	Bagian Organisasi	
					Tujuan 3: Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun bersangkutan	Nilai	BAIK (84,50)		Bagian Organisasi dan Bagian Umum	Kota Blitar
					Sasaran: Meningkatnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik	1. Persentase OPD yang telah melakukan tindak lanjut atas hasil SKM	Jumlah OPD yang telah melakukan tindak lanjut atas hasil SKM pada tahun bersangkutan / Jumlah OPD x 100%	%	27,59		Bagian Organisasi	
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase OPD yang memiliki IKM dengan kategori Sangat Baik	Jumlah OPD yang memiliki nilai IKM dengan kategori Sangat Baik / jumlah seluruh OPD x 100%	%	27,59	433.396.933	Bagian Organisasi	
4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	Jumlah OPD yang menerapkan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi	Jumlah OPD yang menerapkan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi pada tahun n	OPD	22	433.396.933	Bagian Organisasi	
4	01	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana pada tahun bersangkutan	Laporan	5	406.896.933	Bagian Organisasi	
4	01	01	2.13	04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana pada tahun bersangkutan	Dokumen	3	26.500.000	Bagian Organisasi	
						2. Nilai rata-rata SKM Setda	(Nilai SKM layanan surat menyurat dan arsip + Nilai SKM layanan sarana dan prasarana + Nilai SKM layanan kerumahtanggaan + Nilai SKM layanan keprotokolan) / 4	Nilai	BAIK (87,00)		Bagian Umum	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN/DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
									2023			
									K	Rp		
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Fasilitas Layanan Kedinasan KDH/WKDH/ Sekretariat Daerah sesuai standar/ketentuan yang berlaku	Jumlah Fasilitas Layanan Kedinasan KDH/WKDH/ Sekretariat Daerah sesuai standar/ketentuan yang berlaku dibagi jumlah seluruh Fasilitas Layanan Kedinasan KDH/WKDH/ Sekretariat Daerah pada tahun n x 100%	%	100	12.155.625.913	Bagian Umum	
4	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD pada PD yang dikelola sesuai standar	Jumlah BMD pada PD yang dikelola sesuai standar / jumlah seluruh BMD yang ada pada PD x 100%	%	100	9.341.760	Bagian Umum	
4	01	01	2.03 3	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD pada tahun bersangkutan	Dokumen	2	1.600.000	Bagian Umum	
4	01	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD pada tahun bersangkutan	Laporan	2	1.100.000	Bagian Umum	
4	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD pada tahun bersangkutan	Laporan	2	6.641.760	Bagian Umum	
4	01	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pendapatan Daerah	Jumlah Pendapatan Daerah yang diterima pada tahun n / jumlah target Pendapatan Daerah yang ditetapkan pada tahun n x 100%	%	100	1.660.440	Bagian Umum	
4	01	01	2.04 4	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah pada tahun bersangkutan	Dokumen	1	1.660.440	Bagian Umum	
4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan / rencana jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pada tahun n x 100%	%	100	84.840.000	Bagian Umum	
4	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan pada tahun bersangkutan	Unit	0	0	Bagian Umum	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN/DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
									2023			
									K	Rp		
4	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan pada tahun bersangkutan	Unit	0	0	Bagian Umum	
4	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan pada tahun bersangkutan	Unit	1	84.840.000	Bagian Umum	
4	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan pada tahun bersangkutan	Unit	0	0	Bagian Umum	
4	01	01	2.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan pada tahun bersangkutan	Unit	0	0	Bagian Umum	
4	01	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan pada tahun bersangkutan	Unit	0	0	Bagian Umum	
4	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan pada tahun bersangkutan	Unit	0	0	Bagian Umum	
4	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan pada tahun bersangkutan	Unit	0	0	Bagian Umum	
4	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan pada tahun bersangkutan	Unit	0	0	Bagian Umum	
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar / rencana jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pada tahun n x 100%	%	100	3.303.071.024	Bagian Umum	
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat pada tahun bersangkutan	Laporan	1	606.000	Bagian Umum	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN/DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
									2023			
									K	Rp		
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan pada tahun bersangkutan	Laporan	48	1.193.862.370	Bagian Umum	
4	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pada tahun bersangkutan	Laporan	6	82.532.049	Bagian Umum	
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan pada tahun bersangkutan	Laporan	13	2.026.070.605	Bagian Umum	
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai standar	Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai standar / jumlah seluruh Barang Milik Daerah x 100%	%	100	1.426.439.160	Bagian Umum	
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya pada tahun bersangkutan	Unit	2	10.100.000	Bagian Umum	
4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya pada tahun bersangkutan	Unit	65	350.798.452	Bagian Umum	
4	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara pada tahun bersangkutan	Unit	0	0	Bagian Umum	
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara pada tahun bersangkutan	Unit	0	0	Bagian Umum	
4	01	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara pada tahun bersangkutan	Unit	0	0	Bagian Umum	
4	01	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara pada tahun bersangkutan	Unit	1	35.000.000	Bagian Umum	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN/DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
									2023			
									K	Rp		
4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi pada tahun bersangkutan	Unit	4	736.438.000	Bagian Umum	
4	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi pada tahun bersangkutan	Unit	40	264.102.708	Bagian Umum	
4	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi pada tahun bersangkutan	Unit	10	30.000.000	Bagian Umum	
4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah / jumlah Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang seharusnya ada x 100%	%	100	939.565.038	Bagian Umum	
4	01	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada tahun bersangkutan	orang/ bulan	2	180.741.837	Bagian Umum	
4	01	01	2.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan pada tahun bersangkutan	Paket	23	146.763.201	Bagian Umum	
4	01	01	2.11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada tahun bersangkutan	Orang	2	6.060.000	Bagian Umum	
4	01	01	2.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada tahun bersangkutan	orang/ bulan	2	606.000.000	Bagian Umum	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN/DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
									2023			
									K	Rp		
4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang di laksanakan	Jumlah fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang di laksanakan / jumlah seluruh fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang seharusnya ada x 100%	%	100	4.111.168.640	Bagian Umum	
4	01	01	2.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan pada tahun bersangkutan	Paket	4	2.085.224.992	Bagian Umum	
4	01	01	2.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan pada tahun bersangkutan	Paket	4	1.485.395.890	Bagian Umum	
4	01	01	2.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan pada tahun bersangkutan	Paket	12	540.547.758	Bagian Umum	
4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Fasilitasi Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan sesuai dengan SOP	Jumlah Fasilitasi Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan sesuai dengan SOP / jumlah Fasilitasi Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan pada tahun n x 100%	%	80	2.261.360.053	Bagian Umum	
4	01	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan pada tahun bersangkutan	Laporan	33	2.029.664.276	Bagian Umum	
4	01	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan pada tahun bersangkutan	Laporan	400	116.474.614	Bagian Umum	
4	01	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan pada tahun bersangkutan	Laporan	3055	115.221.163	Bagian Umum	
4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun tepat waktu dan sesuai standar / jumlah seluruh dokumen perencanaan dan pelaporan yang seharusnya ada x 100%	%	100	18.179.798	Bagian Umum	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN/DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
									2023			
									K	Rp		
4	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD pada tahun bersangkutan	Laporan	1	18.179.798	Bagian Umum	
					Tujuan 4: Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Penilaian atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah pada tahun bersangkutan	Nilai	A (87)		Bagian Organisasi dan Bagian Umum	Kota Blitar
					Sasaran: Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Penilaian atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah pada tahun bersangkutan	Nilai	A (87)		Bagian Organisasi dan Bagian Umum	
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil Nilai SKM layanan internal Setda yang dilaksanakan pada tahun n		BAIK (87,00)	12.122.636.990	Bagian Organisasi dan Bagian Umum	
4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan tersusun tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun tepat waktu / jumlah seluruh dokumen perencanaan dan pelaporan yang seharusnya ada x 100%	%	100	100.993.536	Bagian Organisasi	
4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada tahun bersangkutan	Dokumen	10	48.851.276	Bagian Organisasi	
4	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD pada tahun bersangkutan	Dokumen	6	52.142.260	Bagian Organisasi	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN/DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
									2023			
									K	Rp		
4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur perangkat daerah yang memperoleh layanan kepegawaian	Jumlah aparatur perangkat daerah yang memperoleh layanan kepegawaian / jumlah seluruh aparatur perangkat daerah x 100%	%	100	91.799.102	Bagian Organisasi	
4	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan yang diadakan pada tahun bersangkutan	Paket	6	40.000.000	Bagian Organisasi	
4	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan pada tahun bersangkutan	orang	84	51.799.102	Bagian Organisasi	
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Jumlah ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar / jumlah seluruh ketersediaan administrasi umum perangkat daerah x 100%	%	100	1.684.478.909	Bagian Umum	
4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan pada tahun bersangkutan	Paket	1	80.326.714	Bagian Umum	
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pada tahun bersangkutan	Paket	7	240.892.474	Bagian Umum	
4	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan pada tahun bersangkutan	Paket	3	32.109.415	Bagian Umum	
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan pada tahun bersangkutan	Paket	170	531.745.507	Bagian Umum	
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan pada tahun bersangkutan	Paket	2	78.428.419	Bagian Umum	
4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan pada tahun bersangkutan	Dokumen	24	47.874.000	Bagian Umum	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN/DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
									2023			
									K	Rp		
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada tahun bersangkutan	Laporan	130	673.102.380	Bagian Umum	
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Jumlah pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar / jumlah seluruh pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah x 100%	%	100	10.245.365.443	Bagian Umum	
4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN pada tahun bersangkutan	orang/ bulan	84	10.234.320.184	Bagian Umum	
4	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD pada tahun bersangkutan	Laporan	4	11.045.259	Bagian Umum	

Tabel 6.3
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Tahun 2024 – 2026

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN/ DEFINISI OPERASIONAL	SATU AN	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB	LOKASI
									2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	4	5	6		7		8		9		10	11
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA													
					Tujuan 2: Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	1. Status EKPPD	Penilaian atas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah oleh Kemendagri	Nilai	Sangat Tinggi (3,3534)		Sangat Tinggi (3,3536)		Sangat Tinggi (3,3538)		Sangat Tinggi (3,3538)		Bagian Pemerintahan	Kota Blitar
					Sasaran 1: Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pembangunan	1. Persentase Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan	Jumlah Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan dibagi jumlah seluruh kebijakan bidang Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat x 100%	%	100		100		100		100		Bagian Pemerintahan	
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase kelurahan tertib administrasi	Jumlah kelurahan swasembada dibagi jumlah kelurahan se Kota Blitar x 100%	%	71,43	105.644.412	85,71	106.700.856	100	107.767.865	100	545.591.862	Bagian Pemerintahan	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN/ DEFINISI OPERASIONAL	SATU AN	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB	LOKASI
									2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah kelurahan yang berkategori cepat berkembang	Jumlah kelurahan yang berkategori cepat berkembang pada tahun n	Kelurahan	19	105.644.412	20	106.700.856	21	107.767.865	21	424.711.562	Bagian Pemerintahan	
2	13	04	2.01	0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan pada tahun bersangkutan	Dokumen	21	105.644.412	21	106.700.856	21	107.767.865	21	424.711.562	Bagian Pemerintahan	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
4	01				SEKRETARIAT DAERAH													
					Tujuan 1: Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) pada tahun bersangkutan	Indeks	83,85		84		84,25		84,25		Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Kota Blitar
					Sasaran: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang diimplementasikan	Jumlah kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang diimplementasikan dibagi jumlah seluruh kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan x 100 %	%	100		100		100		100		Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang ditindaklanjuti	Jumlah rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang ditindaklanjuti / jumlah seluruh rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan x 100%	%	100	10.072.278.937	100	10.173.001.726	100	10.274.731.743	100	51.408.607.275	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN/ DEFINISI OPERASIONAL	SATU AN	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB	LOKASI
									2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang ditindaklanjuti	Jumlah rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang ditindaklanjuti pada tahun n	Rumu san Kebija kan	6	10.072.278.937	6	10.173.001.726	6	10.274.731.743	24	40.492.565.808	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	
4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual pada tahun bersangkutan	Doku men	25	10.072.278.937	25	10.173.001.726	25	10.274.731.743	100	40.492.565.808	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	
					Tujuan 2: Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	1. Status EKPPD	Penilaian atas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah oleh Kemendagri	Nilai	Sangat Tinggi (3,3534)		Sangat Tinggi (3,3536)		Sangat Tinggi (3,3538)		Sangat Tinggi (3,3538)		Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum, Bagian Perekonomian dan Kesra	Kota Blitar
					Sasaran 1: Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pembangunan	1. Persentase Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan	Jumlah Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan dibagi jumlah seluruh kebijakan bidang Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat x 100 %	%	100		100		100		100		Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum, Bagian Perekonomian dan Kesra	
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase rumusan kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	Jumlah rumusan kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti / jumlah seluruh rumusan kebijakan bidang pemerintahan x 100%	%	100	1.129.479.815	100	1.140.774.613	100	1.152.182.359	100	7.561.490.183	Bagian Pemerintahan	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN/ DEFINISI OPERASIONAL	SATU AN	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB	LOKASI
									2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang aktif	Jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dilaksanakan pembinaan dibagi dengan jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan kelurahan sesuai Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 x 100%	%	100		100		100		100			
4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase laporan pelaksanaan tugas Pemerintahan umum yang terfasilitasi	Jumlah laporan pelaksanaan tugas pemerintahan yang terfasilitasi / jumlah laporan pelaksanaan tugas pemerintahan keseluruhan x 100%	%	100	1.023.202.431	100	1.033.434.455	100	1.043.768.799	100	4.113.477.398	Bagian Pemerintahan	
						Persentase laporan pelaksanaan tugas kewilayahan yang terfasilitasi	Jumlah laporan pelaksanaan tugas kewilayahan yang terfasilitasi / jumlah laporan pelaksanaan tugas kewilayahan keseluruhan x 100%	%	100		100		100		100			
						Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dilaksanakan pembinaan	Jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dilaksanakan pembinaan/dengan jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan kelurahan x 100%	%	100		100		100		100			
						Persentase laporan pelaksanaan tugas otonomi daerah yang terfasilitasi	Jumlah laporan pelaksanaan tugas otonomi daerah yang terfasilitasi / jumlah laporan pelaksanaan tugas otonomi daerah keseluruhan x 100%	%	100		100		100		100			
4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan pada tahun bersangkutan	Doku men	10	297.548.226	10	300.523.708	10	303.528.945	40	1.196.203.082	Bagian Pemerintahan	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN/ DEFINISI OPERASIONAL	SATU AN	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB	LOKASI
									2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan pada tahun bersangkutan	Doku men	5	725.654.205	5	732.910.747	5	740.239.854	20	2.917.274.316	Bagian Pemerintahan	
4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah pada tahun bersangkutan	Doku men	4	-	4	-	4	-	16	-	Bagian Pemerintahan	
4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti	Jumlah kerjasama dengan Pemerintah Daerah/Lembaga/ Instansi lain yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah rencana kerjasama dengan Pemerintah Daerah/Lembaga/ Instansi lain pada tahun n x 100%	%	83,33	106.277.384	83,33	107.340.158	83,33	108.413.560	83,33	427.256.235	Bagian Pemerintahan	
4	01	02	2.04	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri pada tahun bersangkutan	Doku men	8	106.277.384	8	107.340.158	8	108.413.560	32	427.256.235	Bagian Pemerintahan	
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase produk hukum yang tidak dibatalkan baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi	Jumlah produk hukum yang tidak dibatalkan baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi / jumlah seluruh produk hukum pada tahun n x 100%	%	100	1.137.206.052	100	1.148.578.112	100	1.160.063.894	100	5.666.244.844	Bagian Hukum	
4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang terlaksana	Jumlah fasilitasi dan koordinasi hukum yang terlaksana / fasilitasi dan koordinasi hukum yang direncanakan x 100%	%	100	1.137.206.052	100	1.148.578.112	100	1.160.063.894	100	4.571.794.644	Bagian Hukum	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN/ DEFINISI OPERASIONAL	SATU AN	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB	LOKASI
									2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun pada tahun bersangkutan	Doku men	320	415.586.088	320	419.741.949	320	423.939.368	1280	1.670.738.778	Bagian Hukum	
4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum pada tahun bersangkutan	Kasus	4	460.543.017	4	465.148.447	4	469.799.931	16	1.851.474.580	Bagian Hukum	
4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi yang Didokumentasi	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi yang Didokumentasi pada tahun bersangkutan	Doku men	70	261.076.947	70	263.687.717	70	266.324.594	280	1.049.581.285	Bagian Hukum	
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang ditindaklanjuti	Jumlah rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang ditindaklanjuti / jumlah seluruh rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat x 100%	%	100	193.340.573	100	195.273.979	100	197.226.719	100	1.566.798.581	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	
4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang ditindaklanjuti	Jumlah rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang ditindaklanjuti pada tahun n	Rumu san kebi ja kan	4	193.340.573	4	195.273.979	4	197.226.719	18	777.267.581	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN/ DEFINISI OPERASIONAL	SATU AN	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB	LOKASI
									2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
4	01	02	2.02	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB pada tahun bersangkutan	Doku men	2	85.221.296	2	86.073.509	2	86.934.244	8	342.606.571	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	
4	01	02	2.02	0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas pada tahun bersangkutan	Doku men	2	108.119.277	2	109.200.470	2	110.292.474	8	434.661.010	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase rumusan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	Jumlah rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang perekonomian yang ditindaklanjuti / jumlah seluruh rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang perekonomian x 100%	%	100	1.186.279.697	100	1.198.142.493	100	1.210.123.918	100	5.274.145.561	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN/ DEFINISI OPERASIONAL	SATU AN	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB	LOKASI
									2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah rumusan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	Jumlah rumusan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti pada tahun n	Rumu san kebija kan	6	1.186.279.697	6	1.198.142.493	6	1.210.123.918	24	4.769.080.461	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	
4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD pada tahun bersangkutan	Doku men	2	209.488.246	2	211.583.129	2	213.698.960	8	842.184.439	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	
4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian pada tahun bersangkutan	Lapor an	2	722.166.126	2	729.387.787	2	736.681.665	8	2.903.251.543	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	
4	01	03	2.01	0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil pada tahun bersangkutan	Doku men	4	254.625.325	4	257.171.578	4	259.743.294	16	1.023.644.479	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	
4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen pemantauan kebijakan sumber daya alam yang ditindaklanjuti	Jumlah dokumen pemantauan kebijakan sumber daya alam yang ditindaklanjuti pada tahun n	Doku men	2	2.330.687.144	2	2.353.994.016	2	2.377.533.956	8	9.369.826.150	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN/ DEFINISI OPERASIONAL	SATU AN	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB	LOKASI
									2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
4	01	03	2.04	0001	Koordinasi, dan Sinkronisasi Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, dan Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja pada tahun bersangkutan	Doku men	2	2.330.687.144	2	2.353.994.016	2	2.377.533.956	8	9.369.826.150	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	
						2. Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan	Jumlah Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan/ Jumlah Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum x 100%	%	100		100		100		100		Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase rumusan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	Jumlah rumusan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti / jumlah seluruh rumusan kebijakan bidang bidang pembangunan x 100%	%	100	1.216.179.797	100	1.228.341.595	100	1.240.625.011	100	6.343.990.638	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	
						Persentase pengadaan barang dan jasa melalui <i>E-Procurement</i>	Jumlah pengadaan barang dan jasa melalui E- Procurement / jumlah seluruh pengadaan barang dan jasa x 100%	%	63,33		76,67		90,00		90,00			
4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah bahan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	Jumlah bahan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti pada tahun n	bahan kebija kan	10	353.036.188	10	356.566.549	10	360.132.215	40	1.419.275.732	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN/ DEFINISI OPERASIONAL	SATU AN	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB	LOKASI
									2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
4	01	03	2.02	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah pada tahun bersangkutan	Doku men	6	73.430.501	6	74.164.806	6	74.906.454	24	295.205.227	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	
4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan pada tahun bersangkutan	Lapor an	16	279.605.687	16	282.401.744	16	285.225.761	54	1.124.070.505	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	
4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	SKM Layanan UKPBJ	Hasil Nilai SKMLayanan UKPBJ yang dilaksanakan pada tahun n	Nilai	BAIK (82,5)	863.143.609	BAIK (83,00)	871.775.045	BAIK (84,00)	880.492.796	BAIK (84,00)	3.470.009.082	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	
						Jumlah Variabel kematangan UKPBJ yang telah mencapai Level 3 (Proaktif)	Jumlah Variabel kematangan UKPBJ yang telah mencapai Level 3 (Proaktif) pada tahun n	Nilai	6/9		7/9		9/9		9/9			
4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa pada tahun bersangkutan	Doku men	80	481.261.809	80	486.074.427	80	490.935.171	320	1.934.768.248	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	
4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada tahun bersangkutan	Doku men	2	53.128.767	2	53.660.054	2	54.196.655	8	213.588.215	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN/ DEFINISI OPERASIONAL	SATU AN	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB	LOKASI
									2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa pada tahun bersangkutan	Orang	300	328.753.034	300	332.040.564	300	335.360.970	1200	1.321.652.620	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	
					Tujuan 2: Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	2. Nilai SAKIP	Penilaian atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh KemenPAN RB	Nilai	BB (72,35) (target 2026)		BB (72,35) (target 2026)		BB (72,35)		BB (72,35)		Bagian Organisasi	Kota Blitar
						3. Persentase Kepala OPD yang paham atas penerapan “Good Governance”	Jumlah Kepala OPD yang paham atas penerapan “Good Governance” dibagi jumlah seluruh Kepala OPD x 100% (penghitungan didasarkan pada: 1. Adanya dialog kinerja untuk menyelaraskan kinerja pimpinan dengan setiap jabatan 2. Penetapan kinerja individu (SKP) Jafung dan Pelaksana berdasarkan Matriks Peran Hasil dan Matriks Peran Hasil selaras/mengacu pada cascading kinerja)	perse n	33,33		66,67		66,67		66,67		Bagian Organisasi	
					Sasaran 2: Terwujudnya internalisasi kinerja organisasi	Persentase OPD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi (penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik)	Jumlah OPD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi (penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik) dibagi jumlah seluruh OPD x 100%	%	76,77		86,21		100		100		Bagian Organisasi	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN/ DEFINISI OPERASIONAL	SATU AN	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB	LOKASI
									2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase OPD yang telah menjalankan 8 area perubahan reformasi birokrasi	Jumlah OPD yang telah menjalankan 8 area perubahan reformasi birokrasi sesuai standar / jumlah seluruh OPD x 100%	%	76,77	635.657.158	86,21	641.863.730	100	648.132.367	100	3.208.612.952	Bagian Organisasi	
4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	Jumlah OPD yang menerapkan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi	Jumlah OPD yang menerapkan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi pada tahun n	OPD	24	635.657.158	26	641.863.730	30	648.132.367	30	2.555.165.292	Bagian Organisasi	
4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan dan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada tahun bersangkutan	Doku men	6	261.496.208	6	264.111.170	6	266.752.282	24	1.051.266.798	Bagian Organisasi	
4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada tahun bersangkutan	Doku men	3	359.160.950	3	362.752.559	3	366.380.085	12	1.443.898.494	Bagian Organisasi	
4	01	01	2.13	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah pada tahun bersangkutan	Doku men	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	8	60.000.000	Bagian Organisasi	
					Tujuan 3: Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun bersangkutan	Nilai	BAIK (85,00)		BAIK (86,00)		BAIK (87,00)		BAIK (87,00)		Bagian Organisasi dan Bagian Umum	Kota Blitar

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN/ DEFINISI OPERASIONAL	SATU AN	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN						UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB	LOKASI		
									2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						2. Persentase OPD yang telah mempunyai inovasi pelayanan publik terintegrasi	Jumlah OPD yang telah mempunyai inovasi pelayanan publik terintegrasi dibagi jumlah OPD x 100% (penghitungan akumulasi didasarkan pada: 1. Inovasi Perangkat Daerah yang ditujukan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik (sesuai obyek yang dilayani) sehingga lebih efektif dan efisien 2. Inovasi Perangkat Daerah yang mampu menggambarkan kolaborasi peran dengan Perangkat Daerah/Instansi lain dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik)	%	25		35		50		50			
					Sasaran: Meningkatnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik	1. Persentase OPD yang telah melakukan tindak lanjut atas hasil SKM	Jumlah OPD yang telah melakukan tindak lanjut atas hasil SKM pada tahun bersangkutan / Jumlah OPD x 100%	%	100		100		100		100		Bagian Organisasi	
						2. Persentase peningkatan inovasi pelayanan publik	Jumlah inovasi tahun n – tahun n – 1 dibagi inovasi tahun n – 1 x 100%	%	25		25		25		25			
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase OPD yang memiliki IKM dengan kategori Sangat Baik	Jumlah OPD yang memiliki nilai IKM dengan kategori Sangat Baik / jumlah seluruh OPD x 100%	%	34,48	437.465.902	41,38	441.575.561	48,28	445.726.316	48,28	2.157.898.362	Bagian Organisasi	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN/ DEFINISI OPERASIONAL	SATU AN	TARGET KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB	LOKASI
									2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	Jumlah OPD yang menerapkan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi	Jumlah OPD yang menerapkan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi pada tahun n	OPD	24	437.465.902	26	441.575.561	30	445.726.316	30	1.758.164.712	Bagian Organisasi	
4	01	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana pada tahun bersangkutan	Lapor an	5	410.965.902	5	415.075.561	5	419.226.316	20	1.652.164.712	Bagian Organisasi	
4	01	01	2.13	0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana pada tahun bersangkutan	Doku men	3	26.500.000	3	26.500.000	3	26.500.000	12	106.000.000	Bagian Organisasi	
						2. Nilai rata-rata SKM Setda	(Nilai SKM layanan surat menyurat dan arsip + Nilai SKM layanan sarana dan prasarana + Nilai SKM layanan kerumahtanggaan + Nilai SKM layanan keprotokolan) / 4	Nilai	SANGAT BAIK (88)		SANGAT BAIK (89)		SANGAT BAIK (90)		SANGAT BAIK (90)		Bagian Umum	
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Fasilitasi Layanan Kedinasan KDH/WKDH/ Sekretariat Daerah sesuai standar/ketentuan yang berlaku	Jumlah Fasilitasi Layanan Kedinasan KDH/WKDH/ Sekretariat Daerah pada tahun n x 100%	%	100	12.286.505.172	100	12.408.543.223	100	12.531.801.656	100	63.350.147.024	Bagian Umum	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN/ DEFINISI OPERASIONAL	SATU AN	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB	LOKASI
									2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
4	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD pada PD yang dikelola sesuai standar	Jumlah BMD pada PD yang dikelola sesuai standar / jumlah seluruh BMD yang ada pada PD x 100%	%	100	9.408.178	100	9.475.259	100	9.543.012	100	37.768.209	Bagian Umum	
4	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD pada tahun bersangkutan	Doku men	2	1.600.000	2	1.600.000	2	1.600.000	8	6.400.000	Bagian Umum	
4	01	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD pada tahun bersangkutan	Lapor an	2	1.100.000	2	1.100.000	2	1.100.000	8	4.400.000	Bagian Umum	
4	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD pada tahun bersangkutan	Lapor an	2	6.708.178	2	6.775.259	2	6.843.012	8	26.968.209	Bagian Umum	
4	01	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pendapatan Daerah	Jumlah Pendapatan Daerah yang diterima pada tahun n / jumlah target Pendapatan Daerah yang ditetapkan pada tahun n x 100%	%	100	1.677.044	100	1.693.815	100	1.710.753	100	6.742.052	Bagian Umum	
4	01	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah pada tahun bersangkutan	Doku men	1	1.677.044	1	1.693.815	1	1.710.753	4	6.742.052	Bagian Umum	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN/ DEFINISI OPERASIONAL	SATU AN	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB	LOKASI
									2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan / rencana jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pada tahun n x 100%	%	100	95.688.400	100	96.545.284	100	97.410.737	100	374.484.421	Bagian Umum	
4	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan pada tahun bersangkutan	Unit	0	0	0	0	2	300.000.000	2	300.000.000	Bagian Umum	
4	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan pada tahun bersangkutan	Unit	0	0	0	0	0	-	0	-	Bagian Umum	
4	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan pada tahun bersangkutan	Unit	0	0	1	5.000.000	1	5.000.000	3	94.840.000	Bagian Umum	
4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan pada tahun bersangkutan	Unit	10	85.688.400	100	86.545.284	100	87.410.737	210	259.644.421	Bagian Umum	
4	01	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan pada tahun bersangkutan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	-	Bagian Umum	
4	01	01	2.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan pada tahun bersangkutan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	-	Bagian Umum	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN/ DEFINISI OPERASIONAL	SATU AN	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB	LOKASI
									2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
4	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan pada tahun bersangkutan	Unit	0	0	0	0	0	0		Bagian Umum		
4	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan pada tahun bersangkutan	Unit	0	0	0	0	0	0		Bagian Umum		
4	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan pada tahun bersangkutan	Unit	10	10.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	20	20.000.000	Bagian Umum	
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar / rencana jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pada tahun n x 100%	%	100	3.336.101.734	100	3.369.462.751	100	3.403.157.379	100	13.411.792.887	Bagian Umum	
4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat pada tahun bersangkutan	Lapor an	1	612.060	1	618.181	1	624.362	4	2.460.603	Bagian Umum	
4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan pada tahun bersangkutan	Lapor an	48	1.205.800.993	48	1.217.859.003	48	1.230.037.593	192	4.847.559.959	Bagian Umum	
4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pada tahun bersangkutan	Lapor an	6	83.357.369	6	84.190.943	6	85.032.853	24	335.113.214	Bagian Umum	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN/ DEFINISI OPERASIONAL	SATU AN	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB	LOKASI
									2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan pada tahun bersangkutan	Lapor an	13	2.046.331.311	13	2.066.794.624	13	2.087.462.570	52	8.226.659.111	Bagian Umum	
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai standar	Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai standar / jumlah seluruh Barang Milik Daerah x 100%	%	100	1.440.053.552	100	1.453.754.087	100	1.467.591.628	100	5.787.838.427	Bagian Umum	
4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya pada tahun bersangkutan	Unit	2	10.201.000	2	10.303.010	2	10.406.040	8	41.010.050	Bagian Umum	
4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya pada tahun bersangkutan	Unit	65	249.306.437	65	252.799.501	65	256.327.496	260	1.109.231.885	Bagian Umum	
4	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara pada tahun bersangkutan	Unit	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	3	15.000.000	Bagian Umum	
4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara pada tahun bersangkutan	Unit	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	300	300.000.000	Bagian Umum	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN/ DEFINISI OPERASIONAL	SATU AN	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB	LOKASI
									2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
4	01	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap yang Dipelihara Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara pada tahun bersangkutan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	Bagian Umum	
4	01	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara pada tahun bersangkutan	Unit	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	4	140.000.000	Bagian Umum	
4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi pada tahun bersangkutan	Unit	4	743.802.380	4	751.240.404	4	758.752.808	16	2.990.233.592	Bagian Umum	
4	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi pada tahun bersangkutan	Unit	40	266.743.735	40	269.411.172	40	272.105.284	160	1.072.362.900	Bagian Umum	
4	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi pada tahun bersangkutan	Unit	10	30.000.000	10	30.000.000	10	30.000.000	40	120.000.000	Bagian Umum	
4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah / jumlah Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang seharusnya ada x 100%	%	100	948.960.689	100	958.450.295	100	968.034.798	100	3.815.010.820	Bagian Umum	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN/ DEFINISI OPERASIONAL	SATU AN	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB	LOKASI
									2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada tahun bersangkutan	orang / bulan	2	182.549.256	2	184.374.748	2	186.218.496	8	733.884.336	Bagian Umum	
4	01	01	2.11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan pada tahun bersangkutan	Paket	23	148.230.833	23	149.713.141	23	151.210.273	92	595.917.448	Bagian Umum	
4	01	01	2.11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada tahun bersangkutan	Orang	2	6.120.600	2	6.181.806	2	6.243.624	8	24.606.030	Bagian Umum	
4	01	01	2.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada tahun bersangkutan	orang /bulan n	2	612.060.000	2	618.180.600	2	624.362.406	8	2.460.603.006	Bagian Umum	
4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang di laksanakan	Jumlah fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang di laksanakan / jumlah seluruh fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang seharusnya ada x 100%	%	100	4.152.280.326	100	4.193.803.130	100	4.235.741.161	100	16.692.993.257	Bagian Umum	
4	01	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan pada tahun bersangkutan	Paket	4	2.106.077.242	4	2.127.138.014	4	2.148.409.394	16	8.466.849.643	Bagian Umum	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN/ DEFINISI OPERASIONAL	SATU AN	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB	LOKASI
									2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
4	01	01	2.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan pada tahun bersangkutan	Paket	4	1.500.249.849	4	1.515.252.347	4	1.530.404.871	16	6.031.302.957	Bagian Umum	
4	01	01	2.12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan pada tahun bersangkutan	Paket	12	545.953.236	12	551.412.768	12	556.926.896	48	2.194.840.657	Bagian Umum	
4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Fasilitasi Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan sesuai dengan SOP	Jumlah Fasilitasi Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan sesuai dengan SOP / jumlah Fasilitasi Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan pada tahun n x 100%	%	80	2.283.973.653	80	2.306.813.390	80	2.329.881.524	80	9.182.028.620	Bagian Umum	
4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan pada tahun bersangkutan	Lapor an	33	2.049.960.919	33	2.070.460.528	33	2.091.165.133	132	8.241.250.856	Bagian Umum	
4	01	01	2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan pada tahun bersangkutan	Lapor an	400	117.639.360	400	118.815.754	400	120.003.911	1600	472.933.639	Bagian Umum	
4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan pada tahun bersangkutan	Lapor an	3055	116.373.375	3055	117.537.108	3055	118.712.479	12220	467.844.125	Bagian Umum	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN/ DEFINISI OPERASIONAL	SATU AN	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB	LOKASI
									2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun tepat waktu dan sesuai standar / jumlah seluruh dokumen perencanaan dan pelaporan yang seharusnya ada x 100%	%	100	18.361.596	100	18.545.212	100	18.730.664	100	73.817.270	Bagian Umum	
4	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD pada tahun bersangkutan	Lapor an	1	18.361.596	1	18.545.212	1	18.730.664	4	73.817.270	Bagian Umum	
					Tujuan 4: Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Penilaian atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah pada tahun bersangkutan	Nilai	A (88)		A (89)		A (90)		A (90)		Bagian Organisasi, Bagian Umum	Kota Blitar
					Sasaran: Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Penilaian atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah pada tahun bersangkutan	Nilai	A (88)		A (89)		A (90)		A (90)		Bagian Organisasi dan Bagian Umum	
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil Nilai SKM layanan internal Setda yang dilaksanakan pada tahun n		SANGAT BAIK (88)	12.243.863.360	SANGAT BAIK (89)	12.366.301.993	SANGAT BAIK (90)	12.489.965.013	SANGAT BAIK (90)	49.368.515.856	Bagian Organisasi dan Bagian Umum	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN/ DEFINISI OPERASIONAL	SATU AN	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB	LOKASI
									2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
4	01	01	2.01		Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan tersusun tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun tepat waktu / jumlah seluruh dokumen perencanaan dan pelaporan yang seharusnya ada x 100%	%	100	102.003.471	100	103.023.506	100	104.053.741	100	410.074.255	Bagian Organisasi	
4	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada tahun bersangkutan	Doku men	10	49.339.789	10	49.833.187	10	50.331.519	40	198.355.770	Bagian Organisasi	
4	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD pada tahun bersangkutan	Doku men	6	52.663.683	6	53.190.319	6	53.722.223	24	211.718.485	Bagian Organisasi	
4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur perangkat daerah yang memperoleh layanan kepegawaian	Jumlah aparatur perangkat daerah yang memperoleh layanan kepegawaian / jumlah seluruh aparatur perangkat daerah x 100%	%	100	92.717.093	100	93.644.264	100	94.580.707	100	372.741.166	Bagian Organisasi	
4	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan yang diadakan pada tahun bersangkutan	Paket	6	40.400.000	6	40.804.000	6	41.212.040	24	162.416.040	Bagian Organisasi	
4	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan pada tahun bersangkutan	orang	84	52.317.093	84	52.840.264	84	53.368.667	336	210.325.126	Bagian Organisasi	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN/ DEFINISI OPERASIONAL	SATU AN	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB	LOKASI
									2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Jumlah ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar / jumlah seluruh ketersediaan administrasi umum perangkat daerah x 100%	%	100	1.701.323.698	100	1.718.336.935	100	1.735.520.304	100	6.839.659.847	Bagian Umum	
4	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan pada tahun bersangkutan	Paket	1	81.129.981	1	81.941.281	1	82.760.694	4	326.158.670	Bagian Umum	
4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pada tahun bersangkutan	Paket	7	243.301.399	7	245.734.413	7	248.191.757	28	978.120.042	Bagian Umum	
4	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan pada tahun bersangkutan	Paket	3	32.430.509	3	32.754.814	3	33.082.362	12	130.377.101	Bagian Umum	
4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan pada tahun bersangkutan	Paket	170	537.062.962	170	542.433.592	170	547.857.928	680	2.159.099.988	Bagian Umum	
4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang dan Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang dan Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang dan Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan pada tahun bersangkutan	Paket	2	79.212.703	2	80.004.830	2	80.804.879	8	318.450.831	Bagian Umum	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN/ DEFINISI OPERASIONAL	SATU AN	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB	LOKASI
									2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
4	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan pada tahun bersangkutan	Doku men	24	48.352.740	24	48.836.267	24	49.324.630	96	194.387.637	Bagian Umum	
4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada tahun bersangkutan	Lapor an	130	679.833.404	130	686.631.738	130	693.498.055	520	2.733.065.577	Bagian Umum	
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Jumlah pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar / jumlah seluruh pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah x 100%	%	100	10.347.819.097	100	10.451.297.288	100	10.555.810.261	100	41.600.292.089	Bagian Umum	
4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN pada tahun bersangkutan	orang / bulan	84	10.336.663.386	84	10.440.030.020	84	10.544.430.320	336	41.555.443.909	Bagian Umum	
4	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD pada tahun bersangkutan	Lapor an	4	11.155.712	4	11.267.269	4	11.379.941	16	44.848.181	Bagian Umum	

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menyajikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Blitar untuk periode 2021 - 2026. Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan diukur dan dihitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu sasaran/program/kegiatan/sub kegiatan yang dijalankan Perangkat Daerah dan Unit Kerja.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah merupakan ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah di tingkat Perangkat Daerah. Dalam hal ini, IKU Perangkat Daerah merupakan indikator kinerja level *impact* yang dipilih dari indikator sasaran atau indikator tujuan perangkat daerah atau indikator sasaran RPJMD sebagai wujud keberhasilan kinerja suatu Perangkat Daerah. Basis perumusan IKU Perangkat Daerah menyesuaikan dengan urusan yang diampu oleh Perangkat Daerah tersebut dan secara langsung mendukung capaian IKU Daerah.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan ukuran capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) ini diambil dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Adapun indikator kinerja Sekretariat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Sekretariat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD serta pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dapat disajikan dalam tabel – tabel berikut ini:

Tabel 7.1.1
Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2022 – 2023 yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Sasaran RPJMD	Tujuan dan Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Target Kinerja	
				2022	2023
1.	Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama	Tujuan: Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	83,60	84,89
		Sasaran: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang diimplementasikan	100%	100%
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Tujuan: Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	BB (72,15)	BB (73,74)
		Sasaran: Terwujudnya internalisasi kinerja organisasi	Persentase OPD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi (penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik)	55,17%	65,52%
		Tujuan: Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Status EKPPD	Sangat Tinggi (3,3531)	Sangat Tinggi (3,3532)
		Sasaran: Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pembangunan	Persentase Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan	100%	100%

No	Sasaran RPJMD	Tujuan dan Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Target Kinerja	
				2022	2023
			Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan	100%	100%
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Tujuan: Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	BAIK (83,00)	BAIK (84,50)
		Sasaran: Meningkatnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik	Persentase OPD yang telah melakukan tindak lanjut atas hasil SKM	20,69%	27,59%
			Nilai rata - rata SKM Setda	Baik (86)	Baik (87)
4.	Meningkatnya tata kelola Perangkat Daerah	Tujuan: Meningkatnya tata kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (86)	A (87)
		Sasaran: Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (86)	A (87)

Tabel 7.1.2
Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2024 – 2026 yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Sasaran RPJMD	Tujuan dan Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Target Kinerja			
				2024	2025	2026	Akhir Periode Renstra
1.	Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama	Tujuan: Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	83,85	84,00	84,25	84,25
		Sasaran: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang diimplementasikan	100%	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Tujuan: Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	BB (72,35) (target 2026)	BB (72,35) (target 2026)	BB (72,35)	BB (72,35)
		Sasaran: Terwujudnya internalisasi kinerja organisasi	Persentase OPD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi (penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik)	76,77%	86,21%	100%	100%
		Tujuan: Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Status EKPPD	Sangat Tinggi (3,3534)	Sangat Tinggi (3,3536)	Sangat Tinggi (3,3538)	Sangat Tinggi (3,3538)

No	Sasaran RPJMD	Tujuan dan Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Target Kinerja			
				2024	2025	2026	Akhir Periode Renstra
		Sasaran: Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pembangunan	Persentase Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan	100%	100%	100%	100%
			Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan	100%	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Tujuan: Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik (85,00) (target 2026)	Baik (85,00) (target 2026)	Baik (85,00)	Baik (85,00)
		Sasaran: Meningkatnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik	Persentase OPD yang telah melakukan tindak lanjut atas hasil SKM	100%	100%	100%	100%
			Nilai rata - rata SKM Setda	Baik (88)	Sangat Baik (89)	Sangat Baik (90)	Sangat Baik (90)
4.	Meningkatnya tata kelola Perangkat Daerah	Tujuan: Meningkatnya tata kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (88)	A (89)	A (90)	A (90)
		Sasaran: Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (88)	A (89)	A (90)	A (90)

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kota Blitar

No	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Capaian					Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun 2026
					2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Persentase PD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi	Jumlah OPD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi (penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik) dibagi jumlah seluruh OPD x 100%	Persen	34,48	55,17	65,52	76,77	86,21	100	100
2.	Persentase kebijakan pemerintahan, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat yang diimplementasikan	Jumlah Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan dibagi jumlah seluruh kebijakan bidang Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat x 100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Capaian					Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun 2026
					2022	2023	2024	2025	2026	
3.	Persentase kebijakan administrasi pembangunan dan umum yang diimplementasikan	Jumlah Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan dibagi jumlah seluruh kebijakan bidang Administrasi Pembangunan dan Umum	Persen	100	100	100	100	100	100	100

Tabel 7.3
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Sekretariat Daerah Kota Blitar

No	Indikator Kinerja Kunci	Formulasi Perhitungan	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Capaian					Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun 2026
					2022	2023	2024	2025	2026	
I.	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan									
	Sekretariat Daerah									
1.	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya, yang ditandatangani pada kuartal pertama	Jumlah proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya, yang ditandatangani pada kuartal pertama dibagi Jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya x 100%	persen	0	0	0	0	0	0	0
2.	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif dibagi seluruh jumlah pengadaan x 100%	persen	1,13	1,13	1,15	1,17	1,19	1,20	1,20
3.	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Nilai (rupiah) pengadaan barang dan jasa yang di belanjakan dibagi nilai pengadaan barang dan jasa dalam RUP x 100%	persen	98,77	98,80	98,85	98,90	98,95	99,00	99,00
4.	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada	Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri dibagi Pagu Pengadaan Barang dan Jasa x 100%	persen	NA	25,35%	61%	83%	87%	90%	90%

BAB VIII PENUTUP

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Blitar 2021–2026 ini memuat kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Blitar 2021-2026 sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Blitar.
2. Jika terjadi perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK), maka akan dilakukan perubahan Renstra yang berpedoman pada kewenangan sesuai dengan Peraturan Walikota yang mengatur Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK).

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 disusun sesuai dengan amanat Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama tahun 2021 – 2026 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD Daerah dan bersifat indikatif.

Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2021–2026 ditetapkan dengan Peraturan Walikota Blitar. Perubahan Rencana Strategis dimaksud selain merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah juga merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Perlu disampaikan bahwa Perubahan Rencana Strategis ini telah diupayakan memuat seluruh aspek yang diharapkan dapat memberikan jawaban sekaligus solusi bagi permasalahan urusan penunjang pemerintahan serta urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa di Kota Blitar, meskipun dalam pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh dinamika perkembangan yang terjadi. Oleh sebab itu, pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis membutuhkan kecermatan, kreativitas dan respon yang cepat terhadap perubahan yang terjadi. Dengan demikian, dokumen perencanaan ini memiliki kelenturan (fleksibilitas) dalam pelaksanaannya, bersifat dinamis dan berdaya guna serta sesuai dengan tujuan Sekretariat Daerah Kota Blitar.